

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN LIMU POLITIK**

**PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS RUKUN
WARGA DI KELURAHAN SIDOMULYO TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Irsyadinnas Harpan Saputra

NPM : 147310640

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2021

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Di Kelurahan Sidomulyo Timur”**.

Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis baik moril maupun materil guna menyelesaikan Skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,Mcl, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Budi Muliando, S.IP.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam meluangkan waktu, pikiran dan tenaga demi kesempurnaan Skripsi ini.
5. Bapak dan ibu segenap dosen/asisten dosen yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat dipergunakan

dalam penyusunan Skripsi ini dan bapak/ibu serta saudara/saudari segenap staf dan pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran Administrasi penyelesaian Skripsi ini.

6. ayah dan juga Ibuku tercinta dan juga Teman seperjuangan dalam menuntut ilmu yang banyak meluangkan waktu bersama penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Dalam penelitian ini mungkin terdapat kesilapan dan kekurangan dalam penulisan atau dari materi, maka penulis mengharapkan kritikan dan saran demi kesempurnaan penelitian ini, selanjutnya penulis mengharapkan semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 14 Juni 2021

Penulis,

Irsyadinnas Harpan Saputra

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
1. Tujuan	17
1.2 Kegunaan.....	17
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	18
1. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan.....	18
2. Konsep Pemerintahan Daerah	21
3. Konsep Manajemen Pemerintahan.....	22
4. Konsep Pengelolaan.....	25
5. Konsep Pengawasan.....	26
6. Konsep Peranan.....	28
B. Peneliti Terdahulu	31
C. Kerangka Pikir.....	33
D. Konsep Operasional	35
E. Operasional Variabel	36
F. Teknik Pengukuran	37
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Populasi dan Sampel	39
D. Teknik Penarikan Sampel	39
E. Jenis dan Sumber Data.....	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	41
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	41
I. Rencana Sistematis Laporan Penelitian	42

BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	49
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	49
B. Gambaran Umum Kelurahan Sialang Sakti.....	53
C. Struktur Organisasi Kelurahan Sialang Sakti.....	60
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Identitas Narasumber.....	61
1. Berdasarkan Usia.....	61
2. Pendidikan.....	62
3. Jenis Kelamin.....	63
B. Hasil Koordinasi Lurah Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam pembangunan Dikelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya.....	64
1. Komunikasi.....	65
2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi.....	72
3. Kompetensi Partisipan.....	81
4. Kesepakatan Komitmen dan insentif.....	85
5. Kontinuitas Perencanaan.....	94
C. Faktor-faktor Penghambat Koordinasi Lurah Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam pembangunan Dikelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya.....	100
BAB VI PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Nama nama Pengurus LKM-RW Sidomulyo Timur.....	14
Operasional Variabel Tentang Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru (Studi Di Kelurahan Sidomulyo Timur).....	41
Jadwal Penelitian Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru (Studi Di Kelurahan Sidomulyo Timur).....	49

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 : Tata Organisasi Pelaksanaan PMB-RW Kota Pekanbaru.....	12
II.1 : Kerangka Pikiran Tentang Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (Studi Kasus Di Kelurahan Sidomulyo Timur).....	39

Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irsyadinnas Harpan Saputra
NPM : 147310640
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian : Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (Studi Kasus Di Kelurahan Sidomulyo Timur)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Usulan Penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Juli 2020

ataan,

METERAN
TEMPEL
DEC8AJX337811821

Irsyadinnas Harpan Saputra

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru (Studi Di Kelurahan Sidomulyo Timur)

Abstrak

Irsyadinnas Harpan Saputra

Kata Kunci : Pemberdayaan, Program PMB-RW

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimanakah Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai. Metode penelitian ini adalah menggunakan tipe penelitian "Kualitatif". Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Unsur Walikota, Ketua Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Marpoyan Damai, RT dan RW Kelurahan Sidomulyo Timur, Tokoh Masyarakat Sidomulyo Timur, Pengurus Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM-RW). Hasil penelitian ialah Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Di Kelurahan Sidomulyo Timur belum bisa meningkatkan ekonomi, sosial masyarakat, akan tetapi pengetahuan masyarakat yang mengikuti pelatihan sudah didapatkan dalam Pelaksanaan Program PMB-RW. Akan tampilan/kemampuan tersebut tidak bisa dijadikan pekerjaan karena tidak adanya modal untuk peralatan dan lain sebagainya dalam membuat lapangan pekerjaan. Partisipasi dari tenaga pendamping sudah berjalan dan memiliki manfaat bagi berjalannya Pelaksanaan Program PMB-RW dalam perencanaan dan pengawasan. Adapun Faktor yang mempengaruhi Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Di Kelurahan Sidomulyo Timur yaitu Partisipasi berbentuk dana dan tenaga/ide berupa gagasan serta keadilan. Dana untuk pelaksanaan kegiatan yang akan mempengaruhi Pelaksanaan sehingga partisipasi tenaga pendamping dan ide gagasan berjalan sesuai keinginan masyarakat. Sehingga berlangsungnya keadilan dalam Pelaksanaan Program PMB-RW.

Improving Community Empowerment Through Community Empowerment Program Based on the Residents of Pekanbaru City (Study in East Sidomulyo Village)

Abstract

Irsyadinnas Harpan Saputra

Keywords: Empowerment, PMB-RW Program

The purpose of this research is to find out how the implementation of the Community Empowerment Program Based on the Community Association (PMB-RW) in Sidomulyo Timur Village, Marpoyan Damai District. This research method is using the type of research "Qualitative". The key informants in this study were the Mayor, Head of Community Empowerment Based on the Rukun Warga, Marpoyan Damai District, RT and RW of East Sidomulyo Village, East Sidomulyo Community Leaders, Management of the Rukun Warga (LKM-RW) Community Self-Sufficiency Institution. The result of the research is that the improvement of community empowerment through the Community Empowerment Program based on the Community Association in East Sidomulyo Village has not been able to improve the economy, social community, but the knowledge of the people who have participated in the training has been obtained in the implementation of the PMB-RW Program. The appearance/ability cannot be used as a job because there is no capital for equipment and so on in creating jobs. The participation of the facilitators has been running and has benefits for the implementation of the PMB-RW Program in planning and monitoring. The factors that influence the improvement of community empowerment through the Community Empowerment Program based on the Rukun Warga in Sidomulyo Timur Village are participation in the form of funds and energy/ideas in the form of ideas and justice. Funds for the implementation of activities that will affect the implementation so that the participation of facilitators and ideas run according to the wishes of the community. So that justice takes place in the Implementation of the PMB-RW Program.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu Negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal tersebut sebagai mana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 1, yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi dibagi lagi menjadi daerah daerah seperti kabupaten dan kota, dan setiap kabupaten dan kota di bagi lagi menjadi daerah-daerah kecamatan yang di atur dalam undang-undang pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otomoni daerah dan tugas pembantunya.

Keberadaan Indonesia sebagai suatu Negara, tentunya tidak terlepas dari konsep bernegara itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai suatu Negara yang berdaulat, Indonesia juga memiliki tujuan sebagai mana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Secara umum fungsi pemerintahan mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yaitu fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, dan fungsi pemberdayaan.

Fungsi pengaturan dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif. (Aini dalam Haryanto dkk, 1997 : 36).

Kemudian, untuk lebih mendekatkan pemerintah kepada masyarakat dan untuk lebih mempercepat tercapainya tujuan negara sebagaimana telah disebutkan diatas, maka dalam sebuah kabupaten/kota dapat dibentuk suatu desa. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada pasal 371 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah yang berbunyi Dalam daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa. Kemudian, dalam ayat (2) menyatakan desa yang dimaksud dalam ayat (1) memiliki kewenangan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang desa.

Dan juga pada pasal 23 Undang-Undang Desa tersebut, dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kemudian, di dalam pasal 25 disebutkan bahwa pemerintah desa yaitu Kepala Desa juga disebut dengan nama lain atau yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kemudian, pada pasal 26 Undang-Undang ini, disebutkan

bahwa Kepala Desa sebagai kepala penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki tugas, tanggungan, hak dan Kewenangan.

Berdasarkan asas otonomi daerah, Desa merupakan daerah otonom yang berhak mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam peraturan tersebut di jelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai organisasi publik, Kantor Camat merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah di wilayah kecamatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengupayakan terciptanya pembangunan yang baik, berkembang dan berkesinambungan di wilayah kecamatan. Pelayanan terhadap masyarakat harus di upayakan secara maksimal oleh perangkat kecamatan, agar memunculkan respon positif dari masyarakat sehingga secara tidak langsung mereka merasa terpanggil untuk turut membantu program-program pembangunan di kecamatan. Sebaliknya, pelayanan yang masih dirasakan sangat kurang oleh masyarakat, akan menimbulkan citra negatif terhadap institusi kecamatan, sehingga dapat memicu timbulnya ketidakpuasan dan mendorong hal-hal atau perbuatan yang kurang mendukung terhadap program-program pembangunan di kecamatan.

Oleh sebab itu, Kantor Camat sebagai motor penggerak pembangunan di tingkat kecamatan harus menunjukkan performannya dimata masyarakat, sehingga kewibawaan aparatur kecamatan benar-benar menjadi figur yang patut di tiru oleh masyarakatnya. Dengan demikian aparatur kecamatan dapat mengerahkan masyarakat secara bersama-sama untuk mencapai visi dan misi pembangunan di kecamatan, melalui program-program yang sudah direncanakan.

Sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 10 bahwa, Kecamatan memiliki kewenangan dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada dikecamatan, meliputi:

1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
2. Fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya.
3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, dan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.

Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah atau Aparatur Sipil Negara pada Kantor Camat kenyataannya tidak dapat diukur secara material atau finansial, tetapi dapat dilihat pada penyelesaian volume dan beban kerja yang ada, dan ketepatan waktu, disamping kualitas pelayanan yang mereka berikan. Selanjutnya sejauhmana tugas-tugas dapat dilaksanakan sesuai bidang kerja dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia, sehingga tujuan dapat dicapai.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada Pasal 1 menyatakan bahwa : (1) Penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan survey kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. (2) Survey dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat.

Hal di atas merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana di amanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu di susun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Disamping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan aparatur pemerintah daerah yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong bagi setiap unit penyelenggara pelayanan dalam meningkatkan kinerjanya secara optimal.

Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan amanat bagi pembentukan Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. Pada dasarnya pembentukan daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian pada daerah serta sebagai pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Perjalanan otonomi daerah ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dinyatakan pada tanggal 4 Mei 1999. Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 terjadi akibat pasca reformasi perubahan UUD 1945 mulai dari perubahan pertama sampai perubahan keempat.

Dalam menjalankan perannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya yang dikenal sebagai otonomi daerah, dengan tiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pengaturan mengenai pemerintahan daerah telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia yang meliputi Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan daerah. Pemerintah pusat terdiri dari Lembaga Eksekutif yakni Presiden dan Legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan pemerintahan menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2014 terbagi menjadi 3 bagian, pertama Urusan pemerintahan Absolut, kedua, urusan pemerintahan Konkuren dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan Umum. Ketiga urusan diatas dibagi menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah. Asas yang digunakan pembagian urusan pemerintahan terdiri dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Dengan demikian pembentukan pemerintah daerah sangat penting artinya untuk melaksanakan pelimpahan tugas dan wewenang oleh pemerintah pusat.

Pembagian daerah-daerah atas wilayah besar dan kecil di Indonesia di atur oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mendasari pembentukan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sejalan dengan hal itu sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya lebih menitik beratkan kewenangan pada daerah kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-harinya berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga dengan demikian daerah Kabupaten/ Kota pulalah yang secara langsung maupun tidak langsung lebih memahami serta dapat menampung keluhan maupun kritikan serta sumbangan pemikiran dari masyarakat.

Otonomi daerah merupakan upaya nyata untuk mewujudkan suatu efisiensi dan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan serta memberika pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Disamping itu, tuntutan otonomi daerah seharusnya dipandang sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintah sehingga sesuai dan fokus pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kelancaran penyelenggaraan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung

dari kompetensi dan kualitas aparatur Negara atau pegawai sebagai abdi Negara dan masyarakat.

Dengan adanya otonomi daerah yang membebaskan setiap daerah untuk mengelola kekayaannya, maka setiap daerah diwajibkan untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada di setiap daerah Provinsi ataupun Kabupaten dan Kota.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia, dan kota Pekanbaru juga tidak lepas dari yang namanya pelaksanaan otonomi daerah, dimana Pekanbaru dituntut untuk mampu mengelola system pemerintahan dalam menata dan memajukan daerah Kota Pekanbaru itu sendiri.

Dalam hidup berbangsa dan bernegara perlu adanya kerja sama yang baik antara pemerintahan dan rakyat. Peran dari masyarakat sangat berpengaruh dalam mewujudkan cita-cita pembangunan. Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan rakyat dapat diharapkan agar tujuan dan sasaran pembangunan itu akan tercapai sehingga dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan suatu keadaan tersebut, bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang kurang mendukung, bahkan dapat menjadi hambatan serta rintangan untuk pembangunan nasional yang dimana pembangunan nasional tersebut memiliki dampak positif dan negative.

Dalam rangka membantu Pemerintahan kelurahan maka meliputi pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dijelaskan bahwa lembaga Kemasyarakatan atau sebutan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Adapun arti penting lembaga kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan kemampuan dari lembaga kemasyarakatan agar lebih mandiri dapat melakukan setiap kegiatannya sendiri dalam membantu tugas atau fungsi pemerintahan dalam melakukan pelayanan, pembangunan serta pemberdayaan pada masyarakat.

Salah satu pemerintah daerah yang aktif dalam melakukan pemberdayaan masyarakat kota Pekanbaru, dilakukan terhadap lembaga Rukun Warga, dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang pemberdayaan dan pengawasan Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 yaitu :

1. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan
2. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
3. Menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan
4. Memberikan bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.

Keberadaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga memiliki peran yang sangat strategis, utamanya sebagai mitra kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan wadah untuk mmeberdayakan masyarakat sehingga eksistensi lembaga ini perlu terus dibina, diperkuat dan diberdayakan secara berkesinambungan. Terutama dalam hal pemberdayaan.

Beberapa ijin yang dikenakan biaya retribusi yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten kepulauan meranti nomor 4 tahun 2018 tentang retribusi perizinan tertentu. Antara lain adalah IMB, SITU HO (ijin gangguan), Dalam Perda no. 4 tahun 2018 adalah perubahan atas perda No. 14 tahun 2012 tentang retribusi perijinan tertentu. pada perda no 4 tahun 2018 terjadi perubahan untuk lampiran I tentang retribusi IMB dan Retribusi Ijin gangguan pada lampiran II saja. Dalam perda No. 4 tahun 2018 tertulis bahwa retribusi izin gangguan adalah pemberian ijin tempat usah/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus – menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesejahteraan kerja. Juga dikatakan pada pasal 24 ayat (2) biaya penyelenggaraan pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penerbitan dokumen ijin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian ijin gangguan. Serta jangka waktu penyelesaian ijin menurut SPP (Standart Pelayanan Publik) KP2T, diantara IMB dan SITU HO. Standart Pelayanan Publik adalah ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dipakai sebagai pedoman dalam pemberian proses perijinan sehingga wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerimaan pelayanan. Berikut ini adalah Tabel pelayanan perizinan tertentu :

Tabel 1.3 : Struktur Besaran Tarif Retribusi Dan Standar Waktu IMB, SITU HO

No	Jenis dan Fungsi Ijin	Ukuran	Tarif Retribusi	Standart Waktu
1.	a. Bangunan Industri dan Pergudangan (mewah) tidak bertingkat	M2	3.465	30 Hari
	b. Bangunan Perdagangan dan jasa (mewah) tidak bertingkat	M2	2.750	30 Hari
2.	a. Stasiun Pemancar TV dan Radio	<25 M2	950,-	Waktu Penyelesaian terhitung saat berkas pemohon lengkap sebagaimana persyaratan yang berlaku
		<401 M2	350,-	
	b. Peternakan sapi, ayam, kambing	<401 M2	350,-	

Sumber : Data sekunder, Perda Nomor 4 tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui standart waktu minimal antar IMB dan SITU non HO mempunyai standart yang sama tetapi dalam keterangannya dijelaskan persyaratan terhitung saat berkas pemohon lengkap berbeda dengan IMB yang sudah menetapkan waktu standart waktu 30 tanpa keterangan.

Pengurusan SITU HO ini persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon begitu banyak karena ijin ini merupakan ijin yang bersinggungan langsung pada masyarakat atau disebut juga ijin gangguan. perlu persetujuan dari warga, kepala desa dan juga camat terkait. Dan juga persyaratan dan alur penerbitan ijin ini melibatkan beberapa SKPD dan langsung juga ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dapat dijelaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal proses pelayanan penerbitan SITU HO sebagai berikut :

- a. Pelanggan mengisi blanko permohonan izin dan lampiran persyaratan ke KPPT
- b. Tahapan verifikasi administrasi oleh seksi penerimaan dan penelitian KPPT, yang dilanjutkan dengan peninjauan teknis oleh tim/Komisi HO. Apabila terdapat kekurangan persyaratan dikembalikan kepada pelanggan untuk dilengkapi dan diperbaiki.
- c. Berkas permohonan Izin yang benar sesuai persyaratan administrasi dan teknis, dilanjutkan dengan proses pencetakan Naskah SK Bupati.
- d. Dilakukan penghitungan dan penetapan retribusi , pelanggan melunasi retribusi izin dan memperoleh tanda bukti pembayaran.
- e. Naskah SK Bupati diverifikasi oleh bagian Hukum SETDAKAB, apabila terdapat kesalahan pencetakan naskah dikembalikan ke KPPT untuk diperbaiki. Naskah Yang telah tercetak dengan benar diteruskan kepada proses penandatanganan oleh Bupati.
- f. SK Bupati kembali kepada KPPT untuk selanjutnya dilakukan pencatatan dalam register penerbitan izin, kemudian diserahkan kepada pelanggan.

Menurut peraturan daerah nomor : 4 tahun 2018 tentang retribusi perijinan tertentu menerangkan bahwa ijin SITU HO atau surat ijin tempat usaha berdasarkan HO masanya atau berlaku selama 5 tahun. Dan apa bila masa berlaku sudah habis maka pemohon harus memperpanjang atau mendaftarkan ulang kembali

ijin yang telah habis masa berlakunya tersebut. Persyaratan untuk daftar ulang SITU HO antara lain :

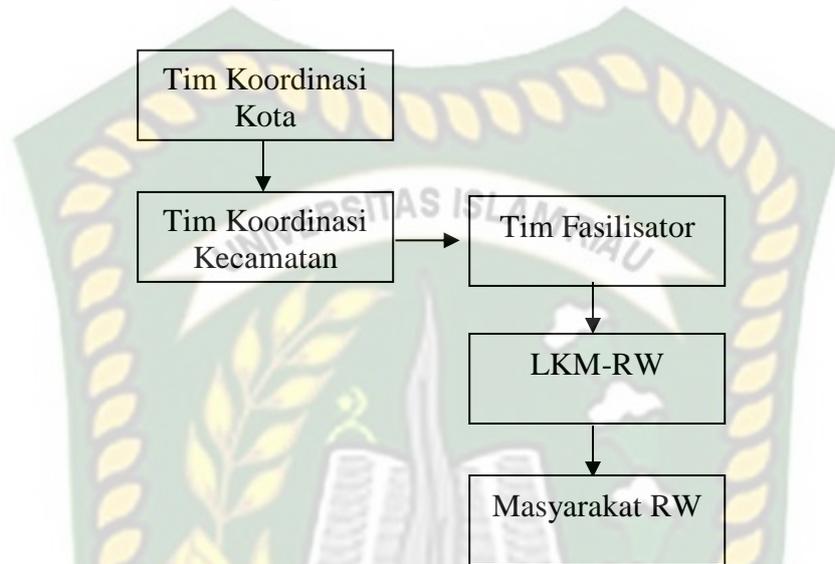
1. Mengisi formulir bermatrai cukup (sesuai perkembangan data terakhir)
2. Foto copy KTP yang masih berlaku
3. Foto copy NPWP
4. Pas photo 3x4 (2 Lembar)
5. Foto copy pelunasan PBB
6. Ijin gangguan HO yang lama.

Pelayanan ijin SITU (surat ijin Tempat usaha) itu pun juga di bagi menjadi 2 yaitu SITU HO yang telah di jelaskan pada tulisan di atas dan juga SITU non HO. Dalam pemrosesan ijin SITU non HO sangat mudah dan tidak melalui proses yang sangat rumit. Hal ini di karenakan SITU non HO merupakan ijin yang wewenang penandatngannya di lakukan sendiri oleh kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan hanya melakukan pelaporan setiap bulannya pada Bupati Kepulauan Merati. Hal ini memberikan efek terhadap pelayanan SITU non HO menjadi lebih cepat.

Salah satu bentuk pelaksanaan tugas Rukun Warga adalah dengan menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga (PMB-RW). PMB RW yang dulunya dikenal sebagai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) bertujuan menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok untuk turut berpartisipasi memecahkan berbagai permasalahan terkait

upaya peningkatan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1.1 Tata Organisasi Pelaksanaan PMB-RW Kota Pekanbaru



Sumber : Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016

Adapun pelaksanaan teknis PMB-RW adalah adalah LKM-RW yang memiliki lingkup kegiatan yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (6) yakni Tugas LKM-RW adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan prinsip Rridaya di lingkungan RW.
2. Melaksanakan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan PMB-RW dilingkungan RW.
3. Melaksanakan Pengumpulan data, validasi data, dan up date data sosial, ekonomi dan lingkungan, serta peta rona lingkungan.

4. Melakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan pemberdayaan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan RW.
5. Melakukan musyawarah untuk menyusun Rencana Kegiatan Pemberdayaan (RKP) RW berdasarkan kebutuhan.
6. Melakukan koordinasi kegiatan PMB-RW dengan semua pihak terkait.
7. Dll

Dan juga berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, yaitu pasal 7 mengenai Keluaran PMB-RW yaitu :

1. Tersusunnya dokumen perencanaan yang terdiri dari :
 - a. Peta Rona Lingkungan
 - b. Data Demografi
 - c. Dokumen Rencana Kegiatan Pemberdayaan Rukun Warga (RKP-RW)
2. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan sosial, pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan lingkungan.

Adapun jumlah Rukun Tetangga dan juga Rukun Warga di Kelurahan Sidomulyo Timur yaitu Rukun Warga (RW) berjumlah 15 dan juga Rukun Tetangga (RT) di seluruh kelurahan Sidomulyo Timur berjumlah 64.

Untuk pelaksanaan PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Timur di bentuk sebuah LKM-RW Sidomulyo Timur yang terdiri dari :

Tabel 1.I : Nama nama Pengurus LKM-RW Sidomulyo Timur

No.	Nama Ketua Pengurus	Jabatan
1.	Ir. Suyotono	RW.01
2.	H. Abdul Bakar Nasution	RW.02
3.	Drs. Zakir Darut	RW.03
4.	M. Zakir	RW.04
5.	Domi Trisno	RW.05
6.	Katman	RW.06
7.	Jalfikar	RW.07
8.	H. Hermansyah, SP	RW.08
9.	Jaruki	RT.01 (RW.09)
10.	Zamri	RW.10
11.	Ribut Mulyono	RW.11
12.	H. Aris Munandar	RW.12
13.	Risman	RW.13
14.	Syahrial	RW.14
15.	Drs. H. Safrialdi	RW.15

Sumber : Kelurahan Sidomulyo Timur, 2019

Dari table di atas terlihat bahwa di Kelurahan Sidomulyo Timur sudah di bentuk LKM-RW Pelaksanaan Program PMB-RW Pekanbaru.

Penelitian berfokus pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Timur, dimana dalam praktek penulisin menemukan beberapa fenomena yang terkait permasalahan tentang Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Studi di Kelurahan Sidomulyo Timur, yaitu :

1. Terindikasi mekanisme Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) sulit untuk dipahami oleh masyarakat. Hal ini terlihat bahwa masih ada Rukun Warga yang tidak mengetahui tentang adanya PMB-RW ini.
2. Terindikasi kegiatan PMB-RW hanya berfokus pada kegiatan yang bersifat pembinaan dan pelatihan, untuk kegiatan programnya sendiri belum ada yang diusulkan dan dijalankan.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan dikemukakan, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu : “Bagaimana Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Di Kelurahan Sidomulyo Timur”.

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian dengan judul “Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Studi Kasus Di Kecamatan Sidmolyo Timur Kota Pekanbaru” maka penulis akan menerapkan beberapa teori yang menurut penulis saling terhubung dengan pemecahan masalah yang di hadapi penulis dalam penelitian ini, adapapun teoritis tersebut, antara lain:

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

a. Pengertian Ilmu Pemerintahan

Konsep Pemerintahan dapat dibuat dalam arti yang luas dan sempit artinya Tugas dan Wewenang Pemerintahan itu dapat diperluas dan dipersempit dengan membentuk organ-organ atau badan-badan dalam Pemerintahan itu sendiri. Menurut Taliziduhu Ndaraha dalam syafiie (2011:63) mendefinisikan ilmu pemerintahan yakni ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa publik dan layanan publik dalam hubungan pemerintahan pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan.

Menurut pendapat Musanef (dalam syafiie 2011:7) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta meyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Kemudian menurut C.F.Strong (dalam syafiie 2011:22) ilmu pemerintahan mempunyai arti luas yaitu kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara kedalam dan keluar. Oleh karena itu yang pertama, harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-Undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan Masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

b. Pengertian Pemerintahan

Menurut Ndraha (2005:36) Pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan Pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Dari penjelasan diatas, jelas bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan menurut Rasyid (1997:11) adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

c. Fungsi Pemerintahan

Menurut Ndraha (2000:78-79) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi primer (fungsi pelayanan)

yaitu fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil, dan layanan birokrasi.

2. Fungsi sekunder (fungsi pemberdayaan)

yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Menurut Adam Smith (1976), pemerintah suatu negara mempunyai tiga fungsi pokok sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri.
2. Menyelenggarakan peradilan.
3. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta.

Sedangkan menurut Richard A. Musgrave dibedakan menjadi tiga fungsi dan tujuan kebijakan anggaran belanja pemerintah, yaitu:

1. Fungsi Alokasi (*Allocation Branch*) yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan Publik (*public needs*)

2. Fungsi Distribusi (*Distribution Branch*) yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial ekonomis; yaitu pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar. Macam-ragam warga negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas fungsi tersebut.
3. Fungsi Stabilisasi (*Stabilization Branch*) yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan dan kebijaksanaan- kebijaksanaan yang ada. Disamping itu, fungsi ini bertujuan untuk mempertahankan kestabilan perekonomian (stabilisator perekonomian)(Guritno, 2000:2).

d. Peran Pemerintahan

Menurut Soerjono Soekanto, "peranan lebih banyak menunjukkan suatu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan."(soekanto, 1987:221).

Kutipan dalam buku yang sama, lebih lanjut Soerjono soekanto mengemukakan aspek –aspek peranan sebagai berikut :

1. Peranan meliputi norma –norma yang di hubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2. Konsep Pemerintahan Daerah

a. Pengetian Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut The Liang Gie, Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.

Lain hal nya dengan C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.

b. Peran Pemerintahan Daerah

Peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:

1. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan
3. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

3. Konsep Pemberdayaan dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan

Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memptivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Selaras dengan yang diungkapkan oleh Zubaedi, bahwa Ginandjar Kartasasmitha menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Carlzon dan Macauley sebagaimana di kutip oleh Wasistiono (1998 :46) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah sebagai berikut : “membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan member orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakantidakanya.”

Pemberdayaan menurut (Suhendra, 2006:74-75) adalah “suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi”.

b. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut (Sumaryadi, 2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah “upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan”. Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadisebagai berikut:

- a. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang

terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan/dikesampingkan.

- b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut maka pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Menurut Abu Huraerah (2008:87) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki.

c. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk

memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik material.

Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan. Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai,

diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan/ daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal (Ambar Teguh, 2004: 80-81).

d. Tahap Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi (Sumodiningrat, 2000 dalam Ambar Teguh, 2004: 82). Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.

2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian (Ambar Teguh, 2004: 83).

e. Dimensi dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Jim Ife & Frank Tegeriero (2008), setidaknya ada enam dimensi pengembangan atau pemberdayaan masyarakat dan kesemuanya berinteraksi satu dengan lainnya dalam bentuk-bentuk yang kompleks. Keenam dimensi tersebut yaitu:

- a. Pengembangan sosial
- b. Pengembangan ekonomi
- c. Pengembangan politik
- d. Pengembangan budaya
- e. Pengembangan lingkungan
- f. Pengembangan personal/spiritual

Beberapa dimensi lebih fundamental daripada lainnya; misalnya banyak orang (khususnya orang-orang pribumi) akan beranggapan bahwa pengembangan personal/spiritual merupakan landasan untuk semua pengembangan yang lain. Tetapi untuk tujuan penyusunan model pengembangan masyarakat dan model

pemikiran tentang peran pekerja masyarakat, keenam dimensi di atas dipertimbangkan sebagai hal yang sangat penting.

Dalam situasi tertentu, tidak semua dimensi ini akan memiliki prioritas yang setara. Masyarakat mana pun akan mengembangkan keenam dimensi tersebut untuk level-level yang berbeda; misalnya, satu masyarakat mungkin memiliki basis ekonomi yang kuat, partisipasi politik yang sehat dan identitas budaya yang kuat, tapi sekaligus memiliki pelayanan kemanusiaan yang kurang baik, lingkungan fisik yang buruk, harga diri yang rendah dan tingkat pengasingan yang tinggi. Dalam masyarakat yang demikian, pengembangan lingkungan dan personal/spiritual akan menjadi prioritas tertinggi dalam program pengembangan masyarakat.

4. Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi

antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009: 115-118).

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Mac Iver dan Page (dalam Soerjono Soekanto 2006: 22), memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia.

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Menurut Emile Durkheim (dalam Soleman B. Taneko, 1984: 11) bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai

sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

b. Pengertian Masyarakat Modern

Masyarakat modern merupakan masyarakat yang sudah tidak terikat pada adat-istiadat. Adat-istiadat yang menghambat kemajuan segera ditinggalkan untuk mengadopsi nilai-nilai baru yang secara rasional diyakini membawa kemajuan, sehingga mudah menerima ide-ide baru (Dannerius Sinaga, 1988: 156).

Berdasar pada pandangan hukum, Amiruddin (2010: 205), menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern mempunyai solidaritas sosial organis. Menurut OK. Chairuddin (1993: 116), solidaritas organis didasarkan atas spesialisasi. Solidaritas ini muncul karena rasa saling ketergantungan secara fungsional antara yang satu dengan yang lain dalam satu kelompok masyarakat. Spesialisasi dan perbedaan fungsional yang seperti diungkapkan tersebut memang kerap dijumpai pada masyarakat modern.

Selain adanya solidaritas organis, Amiruddin (2010: 206) juga menjelaskan bahwa hukum yang terdapat dalam masyarakat modern merupakan hukum restruktif yaitu hukum berfungsi untuk mengembalikan keadaan seperti semula

dan untuk membentuk kembali hubungan yang sukar atau kacau kearah atau menjadi normal. Jadi masyarakat modern merupakan yang sudah tidak terpaku pada adat-istiadat dan cenderung mempunyai solidaritas organis karena mereka saling membutuhkan serta hukum yang ada bersifat restruktif.

c. Masyarakat Tradisional

Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan atau adat-istiadat yang telah turun-temurun. Keterikatan tersebut menjadikan masyarakat mudah curiga terhadap hal baru yang menuntut sikap rasional, sehingga sikap masyarakat tradisional kurang kritis (Dannerius Sinaga, 1988: 152). Menurut Rentelu, Pollis dan Shcaw yang dikutip dalam (P. J Bouman, 1980: 53) masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang statis tidak ada perubahan dan dinamika yang timbul dalam kehidupan.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang melangsungkan kehidupannya berdasar pada patokan kebiasaan adat-istiadat yang ada di dalam lingkungannya. Kehidupan mereka belum terlalu dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari luar lingkungan sosialnya, sehingga kehidupan masyarakat tradisional cenderung statis.

Menurut P. J Bouman (1980: 54-58) hal yang membedakan masyarakat tradisional dengan masyarakat modern adalah ketergantungan masyarakat terhadap lingkungan alam sekitarnya. Faktor ketergantungan masyarakat tradisional terhadap alam ditandai dengan proses penyesuaian terhadap

lingkungan alam. Oleh karena itu masyarakat tradisional mempunyai karakteristik tertentu yang menjadi ciri pembeda dari masyarakat modern. Adapun karakteristik pada masyarakat tradisional diantaranya:

1. Orientasi terhadap nilai kepercayaan kebiasaan dan hukum alam tercermin dalam pola berpikirnya,
2. Kegiatan ekonomi masyarakat bertumpu pada sektor agraris,
3. Fasilitas pendidikan dan tingkat pendidikan rendah,
4. Cenderung tergolong dalam masyarakat agraris dan pada kehidupannya tergantung pada alam sekitar,
5. Ikatan kekeluargaan dan solidaritas masih kuat,
6. Pola hubungan sosial berdasar kekeluargaan, akrab dan saling mengenal,
7. Kepadatan penduduk rata-rata perkilo meter masih kecil, dan
8. Pemimpin cenderung ditentukan oleh kualitas pribadi individu dan faktor keturunan (Dannerius Sinaga, 1988: 156).

Berbeda dengan karakteristik yang diungkapkan oleh Dannerius sinaga, Selo Soemardjan (1993: 62-68) mencirikan masyarakat tradisional berdasarkan pandangan sosiologis. Berikut karakteristiknya:

- a. Masyarakat yang cenderung homogen
- b. Adanya rasa kekeluargaan, kesetiakawanan dan rasa percaya yang kuat antar para warga
- c. Sistem sosial yang masih diwarnai dengan kesadaran kepentingan kolektif

- d. Pranata adat yang efektif untuk menghidupkan disiplin sosial
- e. Shame culture (budaya malu) sebagai pengawas sosial langsung dari lingkungan sosial manusia, rasa malu mengganggu jiwa jika ada orang lain yang mengetahui penyimpangan sistem nilai dalam adat-istiadat.

5. Lembaga Masyarakat

a. Pengertian Lembaga Masyarakat

Dalam rangka membantu Pemerintahan kelurahan maka meliputi pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dijelaskan bahwa lembaga Kemasyarakatan atau sebutan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Adapun arti penting lembaga kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan kemampuan dari lembaga kemasyarakatan agar lebih mandiri dapat melakukan setiap kegiatannya sendiri dalam membantu tugas atau fungsi pemerintahan dalam melakukan pelayanan, pembangunan serta pemberdayaan pada masyarakat.

b. Lembaga Kemasyarakatan Kota Pekanbaru

Salah satu pemerintah daerah yang aktif dalam melakukan pemberdayaan masyarakat kota Pekanbaru, dilakukan terhadap lembaga Rukun Warga, dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang pemberdayaan dan pengawasan Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 yaitu :

1. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan
2. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
3. Menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan
4. Memberikan bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.

Dalam sistem pemerintahan Kota Pekanbaru, dikenal dengan istilah Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau dengan singkatan RT dan RW, yang merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang berada di wilayah kelurahan/desa. Organisasi rukun tetangga dan rukun warga tidak disebut dan tidak dan tidak termasuk dalam system pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kelurahan. Rukun Tetangga dan Rukun Warga dipimpin oleh ketua Rukun Warga (RW) dan ketua Rukun Tetangga (RT) keduanya dipilih oleh warga sekitar Rukun Warga maupun sekitar Rukun Tetangga. Dewasa ini banyak pemilihan ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Indonesia yang dimodel mirip pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah yaitu dengan pemungkutan suara.

c. Tujuan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Pasal 3 yaitu Rukun Tetangga dan Rukun Warga dibentuk dengan maksud tujuan untuk:

- a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong-royong.
- b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan.
- c. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan.
- d. Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga Dan Rukun Warga

Adapun tugas dan fungsi dari Rukun tetangga dan Rukun Warga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Pasal 7 yaitu:

1. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
2. Menggerakkan gotong royong swadaya dan partisipasi masyarakat.
3. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam msyarakat.
4. Membantu terciptanya kebersiha dan keindahan lingkungan.
5. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah.
7. Membantu menciptakan dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

Keberadaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga memiliki peran yang sangat strategis, utamanya sebagai mitra kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan wadah untuk mmeberdayakan masyarakat sehingga eksistensi lembaga ini perlu terus dibina, diperkuat dan diberdayakan secara berkesinambungan. Terutama dalam hal pemberdayaan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini penulis ambil dari beberapa skripsi terdahulu untuk menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian tersebut penulis tidak menemukan adanya penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Permasalahan mengenai penelitian ini bukanlah hal yang baru. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis, berikut penelitian yang terkait:

2. Evliyani (1341020034) yang memiliki judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Anggaran Dana Desa (ADD) Di Desa Wayharu Kecamatan Bangkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat. Tipe penelitian yang di gunakan oleh penelitti ini yakni menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif dan kegiatan penelitin ini di laksanakan di desa wayharu kecamatan bangkunt belimbing kabupaten pesisir barat. Hasil dari penelitian ini yakni dilihat dari tingkat pemberdayaan

masyarakat di desa wayharu kecamatan bangkunt belimbing kabupaten pesisir barat belum terlaksana dengan baik dan anggaran dana desa yang dikeluarkan belum berjalan maksimal.

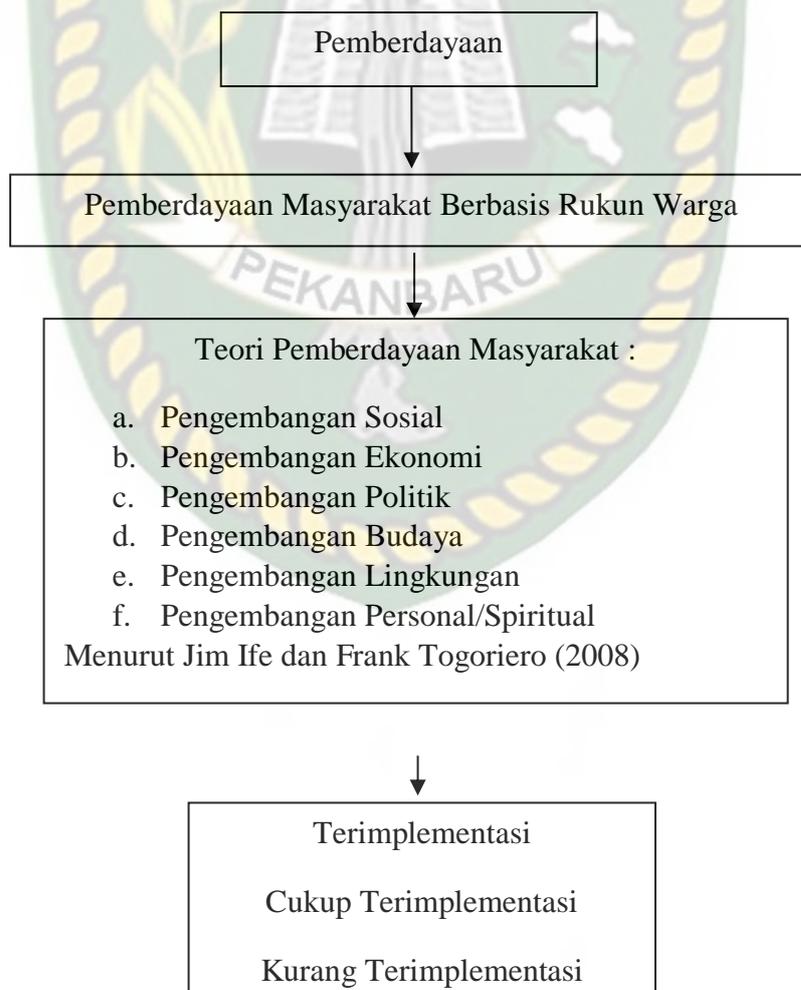
3. Muhammad Afifulloh (1288494) yang memiliki judul penelitian Pemberdayaan Masyarakat Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Melalui P2MKP Citra Mina Lestari. Tipe penelitian yang di gunakan oleh peneliti ini yakni dengan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif dan kegiatan penelitian ini di laksanakan di Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung. Hasil dari penelitian ini ditemukan beberapa kegiatan yang di lakukan P2MKP Citra Mina Lestari dalam pemberdayaan masyarakat dan terdapat juga permasalahan yang kurang efektif di dalam nya.

Dari 2 penelitian terdahulu tersebut maka penulis memiliki persamaan dan perbedaan terhadap rencana yang penulis teliti sekarang. Persamaan nya yakni sama-sama membahas mengenai Pemberdayaan Masyarakat. Tetapi perbedaannya yakni karna lokasi penelitian yang berbeda karna penelitian penulis ini berlokasi di Kota Pekanbaru tepatnya di Kecamatan Marpoyan Damai.

C. Kerangka Pikiran

Untuk mempermudah penelitian ini maka disusun sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar II.1 : Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (Studi Kasus Di Kelurahan Sidomulyo Timur)



Sumber: Modifikasi penelitian 2019

D. Konsep Operasional

Konsep Operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memptivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.
- b. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.
- c. Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia.
- d. lembaga kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan kemampuan dari lembaga kemasyarakatan agar lebih mandiri dapat melakukan setiap kegiatannya sendiri dalam membantu tugas atau fungsi pemerintahan dalam melakukan pelayanan, pembangunan serta pemberdayaan pada masyarakat.
- e. (Pengetian RT dan RW)Pemilihan sampah dilakukan oleh setiap orang yang berada pada pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

E. Operasional Variabel

Operasional variable adalah proses mendefinisikan variable dengan tegas, sehingga menjadi factor-faktor yang dapat di ukur. Adapun penjabaran variable-variable penyelenggaraan pelayanan dalam operasional variable dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel II.1 : Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru (Studi Di Kelurahan Sidomulyo Timur)

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	pengukuran
1	2	3	4	5
(Konsep Pemberdayaan Masyarakat Menurut para ahli)Nurdin Usman (2002:70) berpendapat bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan	Peningkatan	a. Pengembangan Sosial	1. Pengembangan Sosial Masyarakat Rukun Warga	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana
	Pemberdayaan		2. Pengembangan Sosial Masyarakat Rukun Tetangga	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana
	Peraturan	b. Pengembangan Ekonomi	1. Pengembangan Sosial Masyarakat Rukun Warga	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana
	Daerah		2. Pengembangan Sosial Masyarakat Rukun Tetangga	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana
	Pekanbaru No	c. Pengembangan Politik	A. Pengembangan Sosial Masyarakat Rukun Warga	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana
	5 Tahun 2016		B. Pengembangan Sosial Masyarakat Rukun Tetangga	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana
	Tentang	d. Pengemba	1. Pengembangan Sosial Masyarakat Rukun Warga	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana
	Pemberdayaan		2. Pengembangan Sosial Masyarakat Rukun Warga	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana
	Masyarakat		1. Pengembangan Sosial Masyarakat Rukun Warga	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana
	Berbasis Rukun		2. Pengembangan Sosial Masyarakat Rukun Warga	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana
Warga			Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana	

sebelumnya.		<p>ngan Budaya</p> <p>5. Pengembangan Lingkungan</p> <p>6. Pengembangan Personal/Spiritual</p>	<p>Sosial Masyarakat Rukun Tetangga</p> <p>1. Pengembangan Sosial Masyarakat Rukun Warga</p> <p>2. Pengembangan Sosial Masyarakat Rukun Tetangga</p> <p>1. Pengembangan Sosial Masyarakat Rukun Warga</p> <p>2. Pengembangan Sosial Masyarakat Rukun Tetangga</p>	<p>Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana</p>
-------------	--	--	---	--

Sumber :Modifikasi Penelitian Tahun 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian sangat penting menjelaskan tipe penelitian yang akan digunakan. Oleh karena itu, berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis berfikir penelitian ini akan sangat tepat jika penelitian ini menggunakan tipe penelitian "Kualitatif". Metode penelitian "Kualitatif" adalah penelitian tentang riset yang bersifat "Deskriptif" yang cocok menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Landasan teori dijadikan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Dalam menentukan lokasi penelitian ini, penulis beralasan bahwa sebuah daerah memiliki Pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya yang dikenal sebagai otonomi daerah perlu untuk dilakukan penelitian berdasarkan fenomena yang sering terjadi di daerah yang bersangkutan.

Oleh karena itu, sebagaimana telah penulis jelaskan pada bab pendahuluan bahwa di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

Pekanbaru sering sekali terjadi kasus – kasus yang bersangkutan dalam melakukan pemberdayaan terhadap PMB-RW. Dengan alasan yang demikian itu, maka penulis menetapkan Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian ini.

C. Key Informan dan Informan

Maksud dari penelitian ini yang merupakan awal informasi adalah seseorang informan yang memiliki kemampuan dan memiliki relevansi beserta penelitian yang penulis kerjakan ini. Informan atau aktor kunci dalam penelitian lapangan merupakan anggota yang dihubungi peneliti dan yang menjelaskan atau yang menginformasikan tentang lapangan. Walaupun hampir setiap orang dapat menjadi seorang informan, tidak setiap orang menjadi informan yang baik (Spradley,1979:45). Sedangkan yang dimaksud dengan informan kunci (key informan) merupakan penerjemah (*translator*). Hal ini sering kali individu dengan siapa peneliti mengembangkan suatu persahabatan khusus. Ini lebih berguna untuk memandang informan-informan kunci sebagai individu-individu yang bisa mengajar peneliti. Guru itu bisa berbeda menurut topik dan hubungan antara individu-individu. Seringkali ada banyak guru atau ada suatu guru ataupun mentor khusus (Crabtree & Miller, 1992:74).

a. Informan

Karena keterbatasan penulis untuk meneliti seluruh pihak-pihak yang terkait, maka penulis perlu untuk memilih beberapa informan yang cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini. Namun pada

penelitian ini, jumlah informan tidaklah terbatas pada informan yang akan ditetapkan selanjutnya. Informan pada penelitian ini akan terus bertambah jika penulis merasa belum mendapatkan jawaban yang sesuai dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Ketua Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga

b. Informan

Adapun yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah :

1. Unsur Walikota
2. Ketua Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Marpoyan Damai.
3. RT dan RW Kelurahan sidomulyo Timur.
4. Tokoh Masyarakat Sidomulyo Timur.
5. Pengurus Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Waga (LKM-RW).

D. Teknik Penarikan Informan

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan Teknik Penarikan Informan yaitu dengan teknik “*SnowBall*”. Teknik ini yaitu dengan menetapkan beberapa orang menjadi informan dan selanjutnya jika informan yang telah ditetapkan dirasa belum memenuhi kebutuhan atau jawaban yang didapatkan dirasa masih simpang siur, maka informan ini akan bertambah sampai data yang diinginkan peneliti sudah mencukupi atau sudah sesuai dengan yang diharapkan.

E. Jenis dan Sumber Data

Maksud judul tersebut, penulis hanya memakai data primer sebagai dasar penelitian. Data primer tersebut adalah data yang penulis peroleh secara langsung dari orang pertama yang suatu hal ini ialah Ketua PMB-RW Kecamatan Marpoyan Damai. Hal ini dikarenakan permasalahan – permasalahan sebagaimana penulis sebutkan diatas belum diolah menjadi data sekunder. Sehingga penulis tidak mendapatkan data sekunder tersebut.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan berbagai hal untuk mendapatkan data yang penulis butuhkan. Hal ini ditujukan agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Adapun cara – cara yang penulis maksud diatas adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Penyusun melaksanakan observasi langsung kelapangan agar mendapatkan data yang penulis butuhkan. Dalam hal ini penulistelah melakukan observasi untuk mengetahui permasalahan – permasalahan yang kerap terjadi di lokasi penelitian.

2. Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab dengan Informan secara langsung dilapangan. Sampai saat ini penulis telah mendapatkan informasi dari beberapa tokoh masyarakat.

3. Dokumentasi

Cara ini akan penulis gunakan karena penulis merasa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini juga sangat berguna sebagai penambah data penelitian.

Adapun alasan penulis melakukan berbagai cara pengumpulan data sebagaimana penulis jelaskan diatas, agar penulis dapat mengumpulkan data yang lebih baik. Dengan Melihat, Bertanya dan Membaca maka penulis akan mendapatkan hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis menggunakan berbagai cara mengumpulkan data sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas.

G. Teknik Analisa Data

Data – data yang diperoleh dari informan dilapangan harus di analisis agar mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini. Untuk menganalisis data – data tersebut diperlukan sebuah teknik analisis data agar dapat mempermudah proses analisis. Dalam penelitian kualitatif, Teknik Analisa Data biasanya menggunakan Analisis Persepsionis, artinya adalah cara untuk mengolah informasi data yang berupa persepsi informan terkait masalah yang sedang diteliti.” Teknik ini memiliki beberapa tahapan yaitu :

- A. Melaksanakan pemilihan serta pengerjaan klasifikasi data;
- B. Melaksanakan penyuntingan data dan pemberian kode data dan pemberian kode data untuk membangun kinerja analisis data;

- C. Melakukan konfirmasi data yang memerlukan verifikasi data dan pendalaman data; dan
- D. Melakukan analisis data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya akan sangat dibutuhkan jadwal yang ditetapkan sebelumnya. Hal ini berguna agar ada keseriusan peneliti dalam mengejar target yang telah peneliti tentukan tersebut. Dalam sebuah penelitian ilmiah seperti yang saat ini disajikan, ada beberapa tahapan yang harus peneliti lewati sebelum pada akhirnya terjun kelapangan untuk melakukan penelitian. Mulai dari pengajuan judul penelitian, penyusunan proposal penelitian sampai pada akhirnya terjun kelapangan dan melakukan analisis untuk mengetahui hasil penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian yang berjudul Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Di Kelurahan Sidomulyo Timur yang telah peneliti usulkan, peneliti menyusun target ataupun jadwal penelitian selama kurang lebih 6 (enam) bulan seperti pada tabel berikut ini :

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

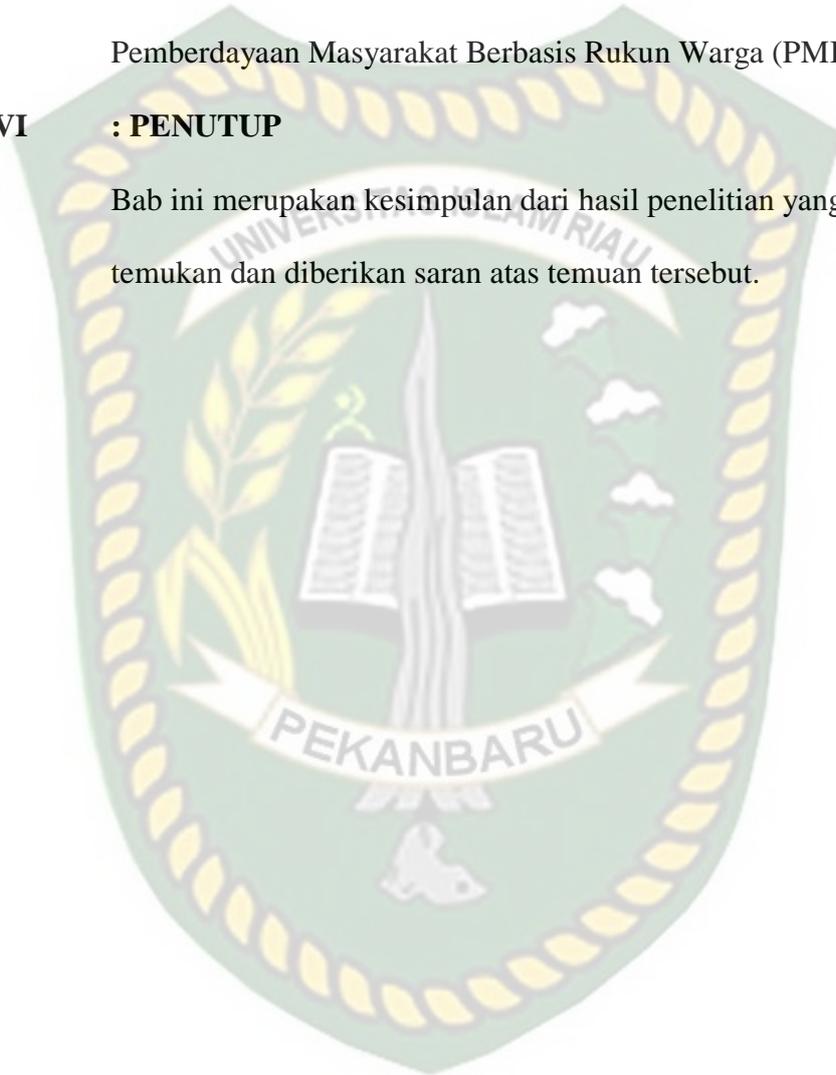
Bab ini membahas permasalahan yang penulis teliti mengenai

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW).

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis temukan dan diberikan saran atas temuan tersebut.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Merbau

Sebelum Indonesia merdeka Kecamatan Merbau berada dalam lingkungan Pemerintahan Kerajaan Siak yang berdiri sampai dengan tahun 1942. Kecamatan Merbau pada masa itu disebut Distrik Merbau dengan Ibu Negerinya Teluk Belitung di bawah Onder Distrik Tebing Tinggi, permulaan Kemerdekaan Republik Indonesia Distrik Merbau menjadi Kecamatan Merbau di bawah Kewedanaan Selat Panjang.

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 lahirlah Kabupaten Bengkalis yang berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Tengah, dan setelah Provinsi Sumatera Tengah dipecah menjadi 3 (tiga) Provinsi yaitu Sumatera Barat, Jambi dan Riau, maka lahirlah pula provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang No.61 Tahun 1958 dan masuklah Kabupaten Bengkalis kedalam Provinsi Riau, sejak lahirnya Kabupaten Bengkalis, maka Distrik Merbau berubah menjadi Kecamatan Merbau berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 221 Tahun 1963 dengan Ibu Kotanya Teluk Belitung langsung dibawah Kabupaten Bengkalis dan Kewedanaan Selat Panjang pula berubah menjadi Kecamatan Tebing Tinggi dengan Ibu kotanya Selatpanjang dan juga langsung dibawah Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2009 Tanggal 19 Desember 2008 terbentuklah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Ibu Kotanya Selatpanjang, oleh karena Kecamatan Merbau dibawah Onder Distrik Tebing

Tinggi pada masa Pemerintahan Kerajaan Siak, maka Kecamatan Merbau secara administrative masuk ke Kabupaten Kepulauan Meranti dan lepaslah dari Kabupaten Bengkalis. Untuk efisiensi dan akselerasi pembangunan serta pemerataan dan untuk menggerak roda pemerintahan, kemasyarakatan dan Sosial Budaya, Kabupaten Kepulauan Meranti mengadakan pemekaran Kecamatan dan Desa salah satu diantaranya termasuk Kecamatan Merbau di mekarkan 2 (dua) Kecamatan yaitu :

Kecamatan Pulau Merbau yang terletak di Pulau Merbau dimekar menjadi Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 07/KPTS/II/2011 Tanggal 26 Februari 2011 dengan ibukotanya SEMUKUT, dan sebagai Camat pertamakalinya yaitu W. ABDUL MALIK, S.Pd.i.berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor KPTS. 821.3/ / tanggal dan Sekretaris Kecamatan yaitu EFFENDI berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor. KPTS. 821.3// Tanggal

Kecamatan Tasik Putri Puyu yang terletak di Pulau Padang dimekar menjadi Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 TAHUN 2012 Tanggal 24 Juli 2012 dengan ibukotanya BANDUL, dan sebagai Camat pertamakalinya yaitu Drs. IZHAR,MH berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor KPTS.821.3/VIII/2012 Tanggal 29 Agustus 2012 dan Sekretaris Kecamatan yaitu T. MAHADAR Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor KPTS. 821.3/VIII/2012 Tanggal 29 Agustus 2012.

B. Kondisi Wilayah Kecamatan Merbau

Kecamatan Merbau terletak di Pulau Padang, letak geografis berada dibagian Timur Pulau Sumatera dengan titik koordinat N. 01° 03'.563" E. 102°26'279" Daerah beriklim Tropis, dengan jumlah desa sebanyak 10 (Sepuluh) desa dan 1 (satu) kelurahan.

C. Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Merbau adalah ± 467,42Ha yang terdiri dari daratan dan lautan dengan jumlah penduduk sebanyak 15.738 jiwa yang terdiri dari = 8.113 Pria dan 7.625 Wanita dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

No	Kelurahan/Desa dan Kode	Luas KM ²	Jumlah					Dasar Pembentukan	Keterangan
			RT	RW	Dusun	KK	Penduduk		
1.	Kel.Teluk Belitung 1410051001	52	23	5	-	1.484	5.222	Permendagri No. 1/1978	
2.	Bagan Melibur 1410052004	41,07	12	4	4	582	2.214		Pemekaran dari Kepenghuluan Telukbelitung
3.	Mayang Sari 1410052023	42,50	12	6	3	260	893	Perda Kab.Kep.Meranti Nomor 6 Tahun 2012	Pemekaran dari desa Bagan Melibur
4.	Mekar Sari 1410052021	29	8	4	4	408	1.483	Perda Kab. Bengkalis Nomor 11 Tahun 2004	Pemekaran dari desa Pelantai
5.	Pelantai 1410052018	19,724	11	3	3	282	995		
6.	Meranti Bunting 1410052002	10	6	3	3	182	666		
7.	Sei. Anak Kamal 1410052026	13,50	9	3	3	241	862	Perda Kab.Kep.Meranti Nomor 6 Tahun 2012	Pemekaran dari desa Pelantai
8.	Sei. Tengah 1410052027	10	6	3	3	189	691	Perda Kab.Kep.Meranti Nomor 6 Tahun 2012	Pemekaran dari desa Meranti Bunting

9.	Tanjung Kulim 1410052019	10	6	3	3	196	705	SK Bupati Bengkalis Nomor 763 Tahun 2003	Pemekaran dari desa Meranti Bunting
10.	Lukit 1410052003	239,63	16	6	6	548	2.007	Sejak Tahun 1942	
	JUMLAH	467,42	109	40	32	4.090	15.738		

Sumber : Kantor Camat Merbau 2020

2 . Data Administrasi

Kondisi bangunan Kantor Camat Merbau dalam kondisi sedang baik yang terdiri dari tujuh ruangan pertama digunakan sebagai ruangan Camat (4x4 m) , ruangan *Kedua* sebagai ruang Sekcam (4x4), ruangan *ketiga* sebagai ruangan Sub Bagian Kasi Kessosbud bergabung dgn Kasubab Umum (5x4 m), ruangan keempat digunakan untuk ruangan *Bendahara* (4x3 m) ruang kelima Kasi Trantib, Kasi PMD (2x4 m), Disdukcapil (5x4 m) masih bergabung dalam satu ruang, kemudian ruangan kelima digunakan untuk ruangan PKK, KONI, LPTQ (7x4 m). selanjutnya ruangan *keenam* terbuka digunakan sebagai tempat Aula Kegiatan (10x4), *ketujuh* digunakan Gudang (1x4 m) penyimpanan Aset Kantor selanjutnya *Kedelapan* Dapur (2x1 m).

D. Geografis

1. Letak Kecamatan

Kecamatan Merbau merupakan Pulau yang berada sebelah Utara pada Kabupaten Kepulauan Meranti dan berhadapan dengan Selat Malaka. Terletak pada Koordinat $01^{\circ} 13'14,8''$ LS. $102^{\circ} 25' 56,7''$ LS. Kecamatan Merbau terletak diantara Pulau Sumatera, Pulau Tebing Tinggi dan Pulau Merbau dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tasik Putri Puyu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tebing Tinggi Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pulau Merbau
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

2. Keadaan Alam

Kecamatan Merbau terdiri dari daratan dan rawa-rawa dengan struktur tanah jenis organosol yang terdapat di sepanjang pantai yang ditumbuhi hutan bakau (mangrove) dengan kondisi pantai landai dan bertebing yang merupakan endapan lumpur. Tanah liat terdapat ± 1 Km dari tebing pantai kedaratan, sedangkan 75 % selebihnya terdiri dari tanah gambut dengan kedalaman 1-4 meter yang merupakan daratan rendah yang ditumbuhi hutan rawa dan perkebunan masyarakat.

3. Iklim

Wilayah Kecamatan Merbau berada diantara 2 buah Selat yaitu Selat Asam dan Selat Lalang dan pada umumnya beriklim Tropis dengan musim kemarau berkisar pada bulan Januari s/d bulan Agustus dan musim Penghujan berkisar pada bulan September s/d bulan Desember dengan curah hujan 91 hari s/d 118 sebanyak 1.200 mm s/d 2.400 mm pertahun, dan pada sekitar bulan Januari s/d Februari angin berhembus dari utara mengakibatkan tinggi gelombang laut dari Selat Malaka berdampak pada Abrasi disepanjang tebing pantai yang pada setiap musimnya runtuh tanah $\pm 2-3$ meter. Ketinggian Wilayah Kecamatan Merbau dari permukaan laut rata-rata 2 meter dengan fotografi relatif mendatar dengan

suhu maksimum 32°C dan suhu minimum 20°C dengan jarak tempuh Pusat pemerintahan Kecamatan Merbau dengan Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Meranti ± 60 KM.

4. Sosial Budaya

Penduduk Kecamatan Merbau mayoritasnya adalah suku Melayu dan suku Jawa dan suku-suku lainnya sebagian kecil saja termasuk juga keturunan Tiong Hua, dengan pertumbuhan penduduk pada umumnya lamban dan relative rendah yaitu 0,17 % pertahun adapun suku-suku yang berdomisiliantara lain :Suku Melayu, Jawa, Aseli (Akit/Anak Dalam), Bugis, Banjar, Bangkinang, Minang, Keturunan Tiong Hua, Batak, Lombok.

B. Kelembagaan Pemerintahan Formal di Kecamatan

Kecamatan Merbau dipimpin oleh Camat, dalam menjalankan roda pemerintahan Camat Merbau dibantu oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi pemerintahan, Kepala Seksi PMD, Kepala Seksi Kessosbud, Kepala Seksi Trantib, Kasubag Umum, masih Kosong serta beberapa staff dan Aparatur yang membidangi masing-masing bidang sesuai dengan tupoksi masing-masing.

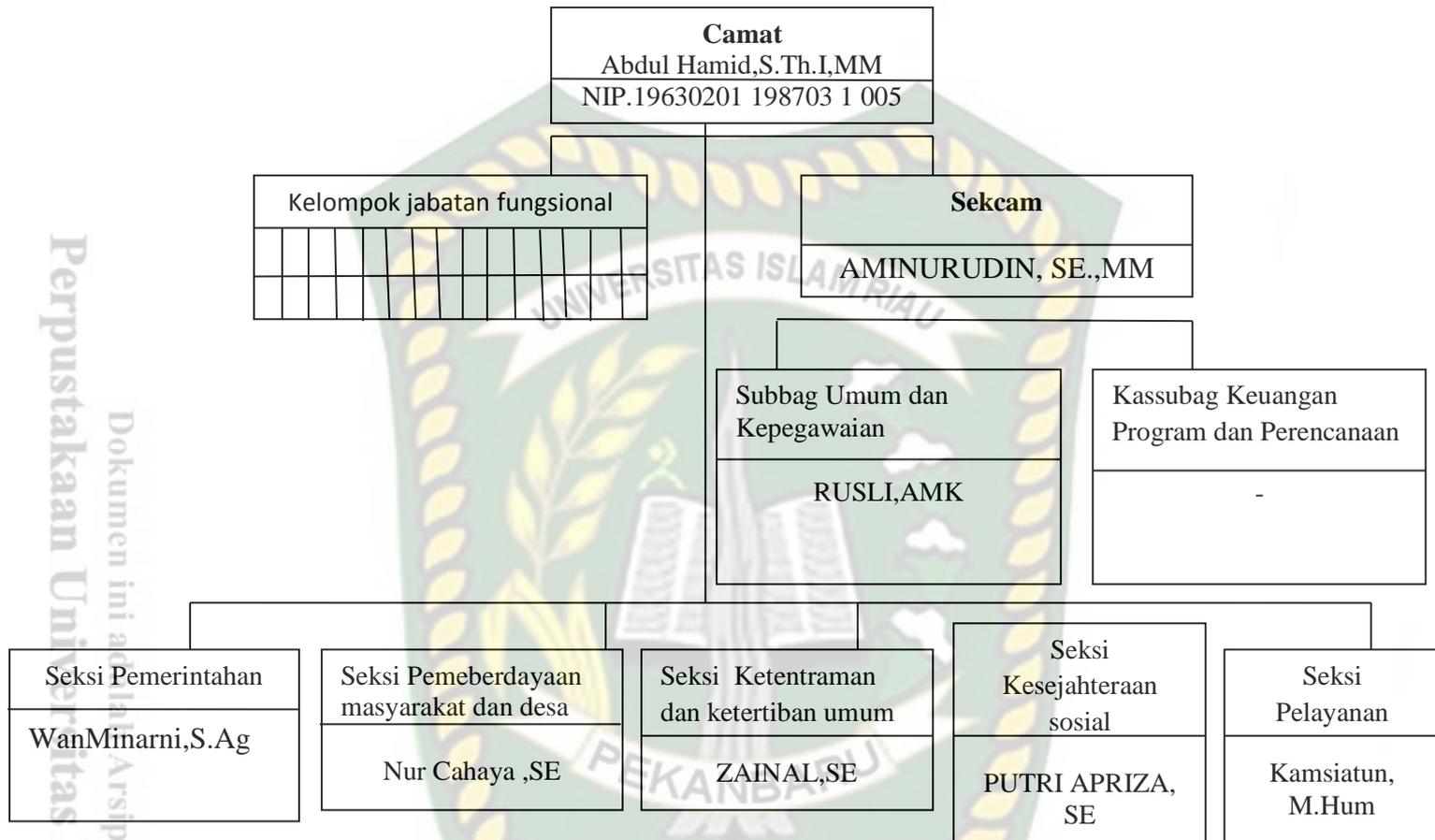
Aparatur kecamatan yang merupakan ujung tombak Pemerintah yang berhubungan langsung dengan pemerintahan desa dan masyarakat sehingga diperlukan kualitas dan dedikasi yang tinggi bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Honorer, untuk mewujudkan hal tersebut, maka dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia secara berkesinambungan perlu dilakukan pembinaan baik seperti Apel pagi, rapat Evaluasi Kinerja staf Pegawai dan honorer serta kegiatan

lainya seperti Wirid Yasin setiap Jum'at dan Olahraga pada Hari Kamis, upaya ini untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja dan loyalitas bekerja secara Profesional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut pada BAB III Pasal 3, Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Sekretariat kecamatan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian umum dan kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan program.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya
7. Seksi Pelayanan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1V.1 Struktur Pemerintahan di Kecamatan Putri Puyuh



C. Sarana dan Prasarana Kecamatan

1. Kantor Kecamatan

Keberadaan sebuah kantor kepala Kecamatan bukan hanya menjadi simbol keberadaan sebuah lembaga Pemerintahan, namun juga menjadi pusat pelayanan bagi masyarakat. Dengan sendirinya, sebuah kantor kepala Kecamatan memiliki fungsi ganda dengan berbagai pemanfaatannya, yang pada hakikatnya akan bermuara kepada terciptanya pelayanan yang maksimal.

Sebagai sarana pelayanan, kantor kepala Kecamatan selalu menampung berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan sebagai simbol pemersatu, keberadaanya telah melembaga sedemikian rupa, sehingga kantor ini selalu dimanfaatkan untuk penyelenggaraan berbagai aktivitas sosial dan kemasayarakatan lainnya.

Dari Sepuluh desa di Kecamatan Merbau ada beberapa desa yang kantor Desanya masih tahap pengerjaan Pembangunan yang di bangun dari Dana PMM Seperti Desa Dedap hanya Desa Bandul menumpang di Kantor UED SP dan kantor BPD, PKK yang pada umumnya disetiap desa masih satu bumbung dengan kantor kepala desa.

D. Potensi Unggulan

Sebagai daerah kepulauan, potensi unggulan adalah:

- a. Perikanan.
- b. Perkebunan.
- c. Pertanian.
- d. Perikanan.

Perkebunan yang ada di Kecamatan Merbau seperti kelapa, karet, rumbia, pinang. Masyarakat banyak memanfaatkan lahan mereka dengan menanam karet. Karet adalah salah satu tanaman yang sangat disenangi oleh petani karena hasil sangat menguntungkan disamping itu pula usia tanaman ini mencapai 7 tahun dalam hasil panen sedangkan panen dilakukan setiap hari. Perkebunan rumbia

juga merupakan salah satu perkebunan yang banyak ditanami oleh masyarakat Merbau setelah karet.

Pengelola pertanian dan perkebunan juga memiliki kendala dari segi pemahaman perkebunan dalam hal ini petani sangat mengharapkan adanya pelatihan-pelatihan yang dapat menambah wawasan mereka serta bantuan untuk mengelola lahan-lahan yang masih kosong dan belum dimanfaatkan oleh petani. Petani juga tak hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah setempat namun mereka juga mengharapkan investor yang dapat bekerjasama dalam hal ini perkebunan dan pertanian di Kecamatan Merbau.

Sebagian besar penduduk di Kecamatan Merbau sesuai potensi dan kondisi wilayah mayoritas mata pencaharian penduduk adalah sebagai petani Karet (60%), petani kelapa (5%), dan petani sagu (15%), pedagang (10%), karyawan baik pemerintah maupun swasta (2%), dan nelayan (5%) dll (3%).

E. Pendidikan

Keberadaan fasilitas pendidikan yang minim telah membuat rendahnya tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Merbau. Berdasarkan data, jumlah penduduk yang memiliki pendidikan sampai dengan Perguruan Tinggi dan tidak sekolah di Kecamatan Merbau diantaranya :

No.	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH SARANA			JUMLAH SISWA			JUMLAH GURU								
		TK	SD	SLTP	TK	SD	SLTP	TK			SD			SLTP		
								PNS	HONDA	HONSEK	PNS	HONDA	HONSEK	PNS	HONDA	HONSEK
1	Teluk Belitung	1	5	1	35	652	350	2	3	-	42	8	17	18	3	7
2	Bagan Melibur	1	1	-	30	154	-	-	2	-	8	1	4	-	-	-
3	Mayang Sari	-	1	-	-	129	-	-	-	-	9	-	3	-	-	-
4	Mekar Sari	-	1	-	14	98	-	-	3	-	8	1	2	-	-	-
5	Pelantai	1	2	-	-	146	-	-	-	-	14	-	6	-	-	-
6	Meranti Bunting	-	2	-	-	66	69	-	-	-	8	1	2	10	1	3
7	Sei. Anak Kamal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Sei. Tengah	-	1	1	-	81	75	-	-	-	5	-	3	1	-	4
9	Tanjung Kulim	-	1	-	-	72	-	-	-	-	6	2	2	-	-	-
10	Lukit	-	3	1	-	270	59	-	-	-	20	2	9	5	-	4
11	Bumi Asri	-	1	0	-	56	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
	<i>Jumlah</i>															

Sumber : Profil tahun 2020

F. Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Merbau adalah:

1. Kemiskinan;

Menurut data dari BPS bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan

Meranti yang tertinggi adalah di Kecamatan Merbau $\pm 38\%$.

2. Infrastruktur;

a. Ada 69 Km jalan poros (penghubung antar desa) di Merbau masih berpermukaan tanah;

b. Gedung Perkantoran;

Semua gedung perkantoran baik kantor Camat, Kantor UPTD, Kantor Capil maupun KUA .

3. Sekolah;

Masih ada sekolah yang belum mempunyai gedung sendiri, rusak, meminjam.

4. Dermaga;

Dari 10 (sepuluh) desa yang ada di Kecamatan Merbau, semuanya mempunyai akses ke laut, namun semuanya belum mempunyai Dermaga yang memadai untuk aktifitas yang bersifat kelautan.

5. Abrasi;

Abrasi adalah persoalan yang sangat mengerikan yang dihadapi oleh masyarakat Merbau, untuk 8 (Delapan) desa yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka (Desa Bandul, Kudap, Dedap, Putipuyu, Tanjungpadang, Tanjungpisang, Mengkirau, Selatakar) tingkat abrasi yang disebabkan oleh gelombang laut adalah 15-30 m per tahun.

6. Listrik;

Dari 10 (sepuluh) desa yang ada di Merbau baru 2 (dua) desa yang sudah di aliri listrik PLN, itupun hanya pada malam hari (dari pukul 18.00 – 06.00 wib). Sisanya ada 8 (Delapan) desa belum tersentuh sama sekali oleh listrik PLN.

7. Air bersih;

Persoalan air bersih adalah persoalan yang sangat penting, karena menyangkut kesehatan dan kecerdasan masyarakat Merbau. Namun, air bersih (layak minum) di Merbau belum ada. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat menggunakan air tanah dan air hujan (tak layak dikonsumsi).

G. VISI DAN MISI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

VISI:

“ Menjadikan Kepulauan Meranti sebagai Kawasan Niaga yang Maju dan Unggul Menuju Masyarakat Madani ”

MISI:

1. Meningkatkan pelayanan pemerintahan yang efisien dan efektif.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (sdm) yang profesional.
3. Meningkatkan infrastruktur dasar dalam rangka merangkai pulau.
4. Menjalin koordinasi dengan pemerintah dan konsultasi dalam pembenahan pelayanan publik.
5. Meningkatkan pembinaan mental spiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlakul karimah.

H. VISI - MISI KECAMATAN MERBAU

Guna mendukung tercapainya visi dan misi kabupaten, maka perlu adanya visi Kecamatan Merbau sebagai berikut :

“Terwujudnya Pelayanan bagi masyarakat untuk menyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan melalui pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan menuju masyarakat yang madani”.

Pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan Merbau sebagai lembaga yang berkompeten dalam pelayanan prima dan harmonis bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan transparan, akuntabel dan partisipatif untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Kepulauan Meranti yang cerdas, sehat dan sejahtera di samping itu Kecamatan Merbau dicapai melalui misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Pemerintah yang Efisien dan Efektif
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Profesional
3. Meningkatkan Infrastruktur Dasar Dalam Rangka Merangkai Pulau
4. Menjalin Koordinasi Dengan Pemerintah dan Konsultasi Dalam Pmbenahan Pelayanan Publik.
5. Meningkatkan Pembinaan Mental dan Spiritual Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlaktul Karimah

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Narasumber

Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut tentang Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Islam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Di Kelurahan Sidomulyo Timur, terlebih dahulu penulis akan menjabarkan secara rinci identitas Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini, adapun identitas tersebut akan diklasifikasikan menurut umur, pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel V.1 Klasifikasi Narasumber Berdasarkan Usia

	Usia	Frekuensi	Persentase
o	25-35	1	7%
.	36-46	2	14%
.	47-57	11	78%
	Jumlah	14	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2021

Berdasarkan pada table diatas, dapat diketahui bahwa narasumber dengan usia antara 25-35 tahun berjumlah 1 orang dengan presentase 7%, narasumber

dengan usia antara 36-46 tahun berjumlah 2 orang dengan presentase 14%, dan narasumber dengan usia antara 47-57 tahun berjumlah 11 orang dengan presentase 78%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa, narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan narasumber yang berada pada usia yang sangat matang , baik dalam mengambil keputusan ataupun kematangan dari pola pikirnya, serta dinilai lebih berpengalaman didalam pekerjaannya, yaitu narasumber yang berada pada usia antara 47-57 tahun dengan jumlah sebanyak 11 orang atau sama dengan 78% dari keseluruhan Narasumber.

Selanjutnya peneliti akan menggambarkan keadaan Narasumber diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikannya, yaitu sebagai berikut :

Tabel V.2 Klasifikasi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
o	SMA	6	43%
.	S1	4	28%
.	S2	4	28%
	Jumlah	14	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2021

Berdasarkan data pada table diatas, dapat diketahui bahwa narasumber dengan tingkat pendidikan SMA berjumlah 6 orang dengan persentase 43%, narasumber dengan tingkat pendidikan Sarjana (S1) berjumlah 4 orang dengan persentase 28%, narasumber tingkat pendidikan S2 berjumlah 4 orang dengan presentase 28%.

Tingkat Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan, baik dalam hal pengetahuan, wawasan, sikap, dan cara berfikir. Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa narasumber yang digunakan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang memiliki kualitas dan kemampuan, dilihat dari jumlah narasumber terbanyak yaitu dengan tingkat pendidikan sarjana.

Terakhir, klasifikasi narasumber dilihat dari jenis kelaminnya, yang akan dijelaskan pada tabel V.3 dibawah ini :

Tabel V.3 Klasifikasi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

o	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
.	Laki-laki	12	86%
.	Perempuan	2	14%
	Jumlah	14	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa narasumber dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 12 orang dengan persentase 86%, sedangkan narasumber dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 2 orang dengan persentase 14%. Adapun pengaruh jenis kelamin adalah pada sikap dari masing-masing gender, dimana seorang laki-laki cenderung lebih cepat, tegas dan memiliki emosional yang tinggi dibandingkan dengan perempuan.

B. Hasil Penelitian Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Di Kelurahan Sidomulyo Timur

Pemberdayaan yang merupakan terjemahan dari kata “empowerment” menurut Webster dalam Prijono dan Pranarka (1996:3) mengandung pengertian yaitu : pertama adalah to give power authority to, dan yang kedua berarti to give ability to or enable. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sementara itu, Sutrisno (2000:185) menjelaskan, dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. perbedaannya dengan pembangunan partisipatif adalah keterlibatan kelompok masyarakat sebatas pada pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan program, sedangkan dana tetap dikuasai oleh pemerintah.

Program Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) merupakan program pengganti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Mekanisme penyelenggaraan program PMB RW

menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan di lapangan. Salah satu mekanismenya adalah melalui prinsip Tridaya yaitu pemberdayaan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan lingkungan kepada seluruh RW yang ada di Kota Pekanbaru Mengingat apa yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa Program Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) dimana peneliti memfokuskan kajian Peningkatan Pemberdayaannya di Kelurahan Sidomulyo Timur. PMB-RW ini ditargetkan Pemerintah Kota Pekanbaru dapat menyentuh pada seluruh Rukun Warga (RW) di Pekanbaru yang direncanakan akan mendapatkan dana masing- masing RW. Namun dalam perjalanannya pelaksanaan peningkatan pemberdayaan ditemui beberapa permasalahan, maka dari itu penulis ingin meneliti tentang bagaimana “Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Di Kelurahan Sidomulyo Timur” dilihat dari segi peningkatan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Jim Ife dan Frank Togoriero (2008) yaitu :

1. Pengembangan Sosial
2. Pengembangan Ekonomi
3. Pengembangan Politik
4. Pengembangan Budaya
5. Pengembangan lingkungan
6. Pengembangan Personal/Spiritual

1. Pengembangan Sosial

Menurut Jahja (2011:28-29) perkembangan (development) adalah bertambahnya kemampuan (skill) dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan, sebagai hasil dari proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Menurut Hartinah (2008: 24) terdapat berbagai macam definisi yang berkaitan dengan perkembangan.

Perkembangan adalah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas fungsi organ-organ jasmaniah dan bukan pada organ jasmani tersebut sehingga penekanan arti perkembangan terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang termanifestasi pada kemampuan organ fisiologis. Proses perkembangan akan berlangsung sepanjang kehidupan manusia, sedangkan proses pertumbuhan seringkali akan berhenti jika seorang telah mencapai kematangan fisik. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial penyesuaian diri terhadap norma-norma yang didasari atas adanya peran dan dorongan hasil dari proses kematangan fisik melalui pembentukan fungsi organ jasmani dan rohani. Dapat juga diartikan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial yang diperoleh melalui kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respons.

Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan sosial, atau norma-norma kehidupan bermasyarakat serta mendorong dan memberikan contoh

kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma ini dalam kehidupan sehari-hari. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerjasama. (Susanto, 2011: 40). Menurut Hurlock (2011:250), perkembangan sosial adalah perolehan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Menjadi orang yang mampu bermasyarakat (sozialized) memerlukan tiga proses. Masing-masing proses terpisah dan sangat berbeda satu sama yang lain, tapi saling berkaitan, sehingga kegagalan dalam satu proses akan menurunkan kadar sosialisasi individu.

Menurut Masitoh dkk (2009:2.14). perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturanaturan masyarakat dimana anak itu berada. Perkembangan sosial diperoleh anak melalui kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respons terhadap dirinya. Sedangkan Muhbin (dalam Nugraha dan Rachmawati 2004 : 1.13) mengatakan bahwa perkembangan sosial merupakan proses pembentukan social self (pribadi dalam masyarakat), yakni pribadi dalam keluarga, budaya, bangsa, dan seterusnya.

Dari pengertian diatas perkembangan sosial anak sangat tergantung pada individu anak, peran orang tua, orang dewasa, lingkungan masyarakat dan termasuk Taman Kanak-kanak. Adapun yang dimaksud dengan perkembangan sosial anak adalah bagaimana anak usia dini berinteraksi dengan teman sebaya, orang dewasa dan masyarakat luas agar dapat menyesuaikan diri dengan baik.

Berdasarkan wawancara Kepada Bapak Edwar Brata Putra selaku Lurah di kelurahan Sidomulyo timur, beliau mengatakan bahwa :

“Program Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) yang dilaksanakan di kota Pekanbaru pertama kali dilaksanakan pada tahun 2014, waktu itu Kecamatan Tenayan Raya menjadi Pilot Project nya. Berkaitan dengan yang ditanyakan tadi tentu ada kepentingan dimana program ini melalui Perda No 5 Tahun 2016 sudah memuat bahwa pelaksanaannya sampai ketahap Rukun Warga.. dimana melalui prinsip Tridaya yaitu pemberdayaan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan lingkungan. Pada program ini juga kita memiliki Tim pendamping sampai ke kelurahannya. Hal ini tentunya dapat menjadi lapangan kerja bagi masyarakat untuk terlibat dalam tim pelaksana program”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa bagaimana kepentingan dari organisasi Pengelola Kegiatan dipengaruhi oleh keberadaan program PMB-RW. Sehingga program ini terus dipacu untuk tetap dilaksanakan.

Kemudian peneliti mewawancarai Sekretaris di kelurahan Sidomulyo Timur yaitu Ibu Yuliarti, beliau mengatakan bahwa:

“Program PMB-RW yang dilaksanakan di Kelurahan Sidomulyo Timur, kami sebagai pendamping merasa sangat bermanfaat bagi masyarakat, contohnya saja pada tahun 2016 beberapa RW Prioritas di kelurahan Sidomulyo Timur mendapatkan alokasi dana bagi penataan kawasan lingkungan pemukiman.”

Melihat hasil wawancara diatas dapat dilihat kepentingan yang ada pada Peningkatan Pemberdayaan Program PMB RW diatas membawa dampak pada ketersediaan lapangan pekerjaan dan juga kelompok sasaran yaitu masyarakat dapat mencapai tujuan program. Dimana jika Peningkatan Pemberdayaan program ini dijalankan maka masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang bersih, mewujudkan kesejahteraan, serta menciptakan kerukunan, keamanan dan

kedamaian. Dari observasi yang penulis lakukan dilapangan bahwa pada kelurahan Sidomulyo Timur ini masih tahap inisiasi.

Kemudian penulis menanyakan kepada ketua RW 05 kelurahan Sidomulyo Timur yaitu :

“Kita sangat mendukung dengan adanya program ini, saya sebagai koordinator LKM dimana RW 05 sebagai Rw prioritas dan memperoleh dana sebesar Rp 24.993.000, untuk semenisasi.

Begitu juga dengan jawaban dari ketua LKM RW sebagai berikut :

“Kami senang pernah mendapat bagian dari RW prioritas yang mendapatkan alokasi dana penataan kawasan lingkungan pemukiman dengan kegiatan semenisasi jalan di wilayah RW 05 ini.”

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa program PMB-RW sangat begitu berpengaruh pada kepentingan masyarakat RW di selingkungan Kelurahan Sidomulyo Timur. Namun kegiatan ini hanya pada aspek Lingkungan belum ada dilaksanakan dari aspek ekonomi dan sosial. Berdasarkan wawancara dan observasi penulis dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Jim Ife dan Frank Togoriero (2008) pada indikator ini bahwa keberhasilan Peningkatan Pemberdayaan Program dipengaruhi oleh pihak kepentingannya yang dipengaruhi oleh kebijakan, yang tergambar pada program PMB-RW tersebut dapat dilihat bahwa kepentingan yang dipengaruhi baik itu ke pengusus Kota sampai kepada fasilitator di kelurahan dan juga kepada wilayah cakupan penerima, dan masyarakat sebagai pemanfaat.

2. Pengembangan Ekonomi

Didasarkan pada keberadaan sistem ekonomi “mainstream” yang tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengembangan alternatif yang berupaya merelokasi aktivitas ekonomi dalam masyarakat agar mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dan merevitalisasi masyarakat lokal untuk memperbaiki kualitas kehidupan. Ada 2 pola : a. Konservatif b. Radikal, Konservatif yaitu Mengefektifkan fungsi dalam tatanan ekonomi yang ada untuk Menarik industri mencoba menarik industri baru ke wilayah lokal dengan memberikan lingkungan yang bagus untuk investasi.

Memulai industri lokal menggunakan sumberdaya, inisiatif, dan tenaga ahli lokal untuk membangun industri lokal baru yang dimiliki dan dijalankan oleh masyarakat lokal dan Pariwisata Pilihan menarik namun perlu kehati-hatian. Terdapat paradigma eksploitatif. Perlu ada strategi bertahan aspek kultural masyarakat.

Radikal yaitu Prinsip otonomi Koperasi Memperkuat solidaritas masyarakat. Membangun paradigma merencanakan keuntungan jangka panjang yang potensial dari pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat itu sendiri. Bank Masyarakat (Credit Unions) Bentuk kontrol masyarakat lokal. Merupakan sekelompok orang yang sepakat untuk menanamkan uang mereka secara bersama-sama dan memberikan pinjaman pada anggotanya.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Edwar Brata Putra selaku Lurah Di Sidomulyo Timur, beliau mengatakan bahwa :

“Program PMB-RW ini sudah dimulai sejak tahun 2014, ini masih tahap inisiasi dan Kecamatan Tenayan Raya sebagai pilot projectnya. Program PMB-RW tahun 2014 itu pemberian dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) senilai Rp 50.000.000,- kepada 94 Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM-RW) melalui rekening koperasi masyarakat. Berikutnya tahun 2015, program PMB-RW dilaksanakan berdasarkan usulan kebutuhan masyarakat meliputi, aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sampai kepada tahun berikutnya, melihat dari program ini tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat dikarenakan ada 3 aspek yang akan di usulkan untuk dibiayai.”

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa terdapat ekspektasi yang tinggi agar program ini bermanfaat besar terhadap kemajuan masyarakat kota Pekanbaru umumnya dan kelurahan Sidomulyo Timur khususnya. Dari observasi yang penulis lakukan dilapangan program PMB-RW yang ada di kelurahan Sidomulyo Timur ini masih tahap sosialisasi, dimana masih dilakukan pembekalan dengan diadakannya seminar seperti latihan menjahit, tata boga dan kerajinan rajutan.

Untuk itu selanjutnya penulis mewawancarai Sekretaris Lurah Yaitu Ibu Yuliarti tersebut untuk melihat manfaat yang diterima oleh pemanfaat program PMB-RW ini sebagai pemanfaat langsung, yaitu sebagai berikut :

“Iya, program ini memang bagus, kami tentu mendukungnya, tetapi kami baru mewawawarakan rencana usulan apa yang akan kami ajukan, selama ini masih tahap sosialisasi saja, kalau pun ada dari kelurahan info ya untuk berpartisipasi pada pembekalan kerajinan tangan, jahit yang diadakan di kantor lurah.”

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat kelurahan Sidomulyo Timur melalui ketua LKM nya menyampaikan bahwa mengetahui

bahwa program ini memberikan dampak yang besar tetapi, beliau menyampaikan belum adanya terealisasi dana tersebut karena masih pada tahap sosialisasi saja.

Begitu juga dengan jawaban dari Ketua LKM yaitu Bapak Benny Suendrawati, yaitu sebagai berikut :

“Wah.. kalau ditanya manfaatnya, tentulah sangat bermanfaat. Hendaknya program ini bisa didanai untuk kegiatan ekonomi juga kalau sekarang usulan kita yang didanai ya bentuk semenisasi, alhamdulillah sekarang akses jalan di usulkan sudah bagus untuk dilalui.”

Dari penjelasan Ketua LKM tersebut dapat dilihat bahwa program PMB-RW ini telah terealisasi dari segi penataan kawasan lingkungan pemukiman walaupun harapannya program ini bisa mendanai usulan kegiatan ekonomi dan sosial yang tertera pada prinsip tridaya program PMB-RW. alokasi dana yang diberikan kepada Kelurahan Sidomulyo Timur. Total dana yang diberikan adalah Rp 74.969.000 (Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dengan kegiatan semenisasi tentunya sangat membawa manfaat bagi RW di kelurahan Sidomulyo Timur.

Hal ini juga diperkuat dengan wawancara peneliti dengan Ketua LKM nya. Namun manfaat yang dirasakan hanya pada aspek lingkungan dan belum signifikan dirasakan warga sesuai dengan Prinsip Tridaya.

Hal ini senada dengan wawancara peneliti dengan Ketua RW 05, beliau mengatakan bahwa :

“Tahun 2016 terdapat 3 Rw yang menjadi skala prioritas, baru 3 itu yang berjalan agenda kegiatannya, tapi yang saya tidak faham ada saja RW yang menolak kegiatan/program ini. Saya belum jelas alasan pastinya. Tentu ini disayangkan karena program ini bermanfaat bagi masyarakat”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa program PMB-RW membawa manfaat dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tentunya manfaat yang dirasakan ini belum dirasakan warga kelurahan Sidomulyo Timur dikarenakan masih 3 LKM yang didanai usulan kegiatannya. Bentuk kegiatan yang didanai baru pada aspek lingkungan dan pada tahun selanjutnya belum ada usulan yang didanai lagi. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari indikator jenis manfaat yang dihasilkan dapat dilihat bahwa Program PMB-RW di kelurahan Sidomulyo Timur ini masih kurang memberikan manfaat yang signifikan untuk membantu masyarakat.

Pada Pelaksanaan Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Timur dalam pengamatan penulis yaitu belum berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat yang mengikutinya. Hal tersebut dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan pada Pelaksanaan program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Timur belum tercapai dengan baik. Kegiatan Pelaksanaan Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Timur hanya berlangsung sebentar saja. Kegiatan tersebut hanya berupa pelatihan. Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menganalisis bahwa Pelaksanaan Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Timur ini belum meningkatkan atau merubah sosial kehidupan masyarakat yang mengikuti kegiatan PMB-RW. Pelaksanaan Program ini hanya berlangsung

beberapa hari saja, dan tidak menjadikan sebagai kegiatan yang merubah status atau kelas sosial masyarakat yang mengikutinya.

3. Pengembangan Politik

Pengembangan Politik itu Berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam arena politik dan untuk meningkatkan kapasitas kekuasaan baik dalam masyarakat secara menyeluruh maupun perseorangan dan kelompok untuk dapat memberikan kontribusi dalam proses masyarakat, aktivitas dan keputusan tersebut Ada 3 proses penting : Peningkatan kesadaran, pengorganisasian, dan juga aksi

Peningkatan Kesadaran yaitu Kemampuan menghubungkan pengembangan personal dan politik, membantu orang-orang berbagi pengalaman dan memikirkan situasi mereka dengan membuka peluang untuk bertindak Pengorganisasian yaitu Membangun alternatif dan struktur otonom dalam jangka panjang serta Meredefinisi proses pembuatan keputusan seperti prosedur pertemuan formal dan Rotasi peran struktural (melibatkan warga).

Pengorganisasian dapat Membantu meningkatkan kewenangan yang efektif dalam arena lebih luas, serta Aksi Sosial bisa tercapainya bentuk perubahan dalam lingkungan eksternal yaitu misalnya : menghentikan pembangunan bandara, mengurangi kekerasan dalam program televisive.

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam implementasi kebijakan publik, baik secara geografis maupun organisatoris, akan semakin sulit

pula implementasi program. Karena semakin banyak satuan-satuan pengambil keputusan yang terlibat di dalamnya. Dilihat dari segi struktur organisasi pelaksana program PMB- RW ini sudah dikatakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan program dilapangan. Berdasarkan uraian tugas pelaksana Program PMB-RW, semua mekanisme pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan program telah disusun dengan baik. Namun dalam implementasi program PMB RW dengan mekanisme pengambilan keputusannya terlihat kurang terlaksana ini ditandai dengan observasi penulis dimana masih minim usulan kegitannya didanai.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Lurah Sidomulyo Timur yaitu Bapak Edwar Brata Putra, beliau mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan kegiatan PMB-RW tahun 2016 minim diacc, artinya belum terealisasi usulan kegiatan LKMnya, itu dikarenakan adanya batasan anggaran APBD 2016”.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Unsur Walikota Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Program PMB-RW dari tahun 2014 dan dalam 5 tahun masih tahap inisiasi, memang sudah ada usulan kegiatan yang didanai yaitu dari aspek sosial sebagian dan lingkungan, pernah tahun 2016 pelaksanaan kegitannya banyak yang belum terealisasi dikarenakan keterbatasan anggaran APBD 2016, ya tentunya mempengaruhi pelaksanaan kegiatan”.

Dari wawancara tersebut terlihat bahwa dalam Peningkatan Pemberdayaan program terkait kedudukan pengembangan Politik masih kurang maksimal dilaksanakan. Hal ini walaupun telah diuraikan tupoksi dengan sangat detail tetapi masih terkendala dalam pelaksanaan karena keputusan ditingkat kota dengan terbatasnya anggaran menyebabkan kegiatan tidak terealisasi seluruhnya.

Indikator pengembangan politik yang dapat diharapkan telah jelas bahwa setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Penulis menanyakan kepada Ketua LKM yaitu Bapak Benny Suendrawati yaitu sebagai berikut :

“Program PMB-RW ini adalah program pemberdayaan yang bentuknya partisipasi masyarakat, jadi kebijakan pemberdayaan selama ini tingkatnya kelurahan, maka pada program PMB-RW ini kita berharap masyarakat di tingkat Rukun warga dapat juga mengakses pembangunan maupun mengusulkan kebutuhan yang ada dilingkungannya, harapannya ya masyarakat bisa mandiri.”

Program berbasis pemberdayaan memang menjadi solusi yang menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya masyarakat nantinya dapat lebih berdaya dan mandiri untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Jika dilihat dari program PMB-RW ini maka perubahan yang diharapkan adalah melalui prinsip tridaya yaitu: 1. Melalui pemberdayaan ekonomi yang menjadi sarannya adalah kesempatan, lapangan kerja, dan daya beli sehingga nantinya dapat mencapai kesejahteraan. 2. Pemberdayaan sosial yang menjadi sarannya adalah kesetiakawanan sosial dan diharapkan masyarakat

dapat rukun 3. Pemberdayaan lingkungan yang menjadi sarannya adalah sarana, prasarana, kelestarian lingkungan dan diharapkan dapat menjadi lingkungan yang bersih, asri, dan sehat.

4. Pengembangan Budaya

Globalisasi budaya, globalisasi ekonomi yaitu Ada 4 skema : a. Melestarikan budaya lokal b. Melestarikan budaya asli c. Multikulturalisme d. Budaya partisipatori. Melestarikan budaya local dan Pengembangan masyarakat berupaya mengidentifikasi elemen-elemen penting dari budaya lokal dan melestarikannya. Contoh : sejarah lokal, peninggalan berharga (heritage), kerajinan berbasis lokal, makanan lokal atau festival/ pekan raya lokal, musik local. Melestarikan budaya asli dan Isu sentral pengembangan masyarakat dalam melestarikan dan menghargai budaya orang pribumi.

Dasar kekuatan : ada klaim istimewa yang dimiliki orang pribumi dalam lahan/daerah terhadap struktur komunitas yang berkembang dan ada banyak kerugian yang dilakukan ketika mengorbankan orang pribumi atas nama pengembangan masyarakat, Indigenous (pribumi) : pengembangan melibatkan tradisi budaya pribumi. Multikulturalisme menekankan berbagai macam kelompok etnis berbeda yang tinggal di suatu masyarakat namun dengan tetap mempertahankan identitas budaya yang berbeda.

Pengembangan masyarakat untuk membantu mempertahankan integritas keanekaragaman budaya sambil mengupayakan cara mengintegrasikan tradisi budaya yang berbeda dalam masyarakat lokal dan memperkaya pengalaman

budaya yang ada. Budaya Partisipatif yaitu aspek partisipasi dalam aktivitas budaya, bukan mempertahankan tradisi budaya. Pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan Isu-isu golongan, gender, ras/etnis yang diidentifikasi dan diakui dalam mendorong partisipasi budaya.

Untuk itu pada indikator ini peneliti ingin melihat bagaimana “Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Di Kelurahan Sidomulyo Timur” dari segi pelaksana program / implementor program.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Unsur Walikota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk tahap inisiasi selama lima tahun ini masih banyak kendala dalam realisasi namun sudah ada beberapa pembekalan pelatihan yang dilaksanakan. Untuk tim koordinator tetap melaksanakan sosialisasi. Berdasarkan review pelaksanaan program PMB-RW tahun 2014-2016 untuk pelaksanaan kegiatan penataan kawasan lingkungan dari 166 RW prioritas hanya dialokasikan anggaran”.

Kemudian penulis mewawancarai Lurah Sidomulyo Timur yaitu Bapak Edwar Brata Putra, beliau mengatakan bahwa:

“Tahap sosialisasi Program PMB RW dilaksanakan tingkat kota, sampai RW dan juga karena program unggulan oleh bapak Walikota Pekanbaru, pak Firdaus. Jadi beliau juga sering menyampaikan dalam kegiatannya menjelaskan

program PMB-RW ini dengan melakukan pengenalan terhadap program ini melalui musyawarah.”

Dari segi pelaksana program untuk tahap sosialisasi telah dilaksanakan, namun jika dilihat dari data penerima usulan kegiatan Program masih sedikit dan lebih kepada kegiatan non fisik terutama di wilayah Kelurahan Sidomulyo Timur. Hal ini berkaitan dengan informasi dari fasilitator kelurahan masih ada Rw yang menolak untuk kegiatan lingkungan Program PMB-RW. Masyarakat kelurahan Sidomulyo Timur sebagai sasaran dari program PMB-RW ini juga merupakan bagian dari pelaksana. Dimana yang melaksanakannya melalui LKM RW masing – masing. Ketepatan sasaran untuk pemanfaat program PMB-RW, apakah program telah diberikan kepada mereka yang layak menerimanya yaitu seluruh RW di lingkungan Sidomulyo Timur.

Seperti wawancara penulis dengan Sekretaris Lurah yaitu Ibu Yuliarti, beliau mengatakan bahwa:

“Penentuan kelompok mana yang bisa alokasi anggaran adalah LKM-Rw yang mengusulkan kegiatan dan telah diverifikasi di kecamatan terhadap kelengkapan berkas. Kemudian Pengguna Anggaran menetapkan LKM-RW yang lulus verifikasi dan akan membentuk Tim pekerja swakelola yang ditetapkan oleh ketua LKM-RW. Ini dilakukan agar jelas siapa penggunanya dan sesuai seperti pada Petunjuk teknisnya.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran yang diberikan adalah benar kepada LKM yang mengusulkan kegiatan Namun dilapangan penulis melihat bahwa penerimanya adalah masih kepada Rw Prioritas. Sedangkan Rw lain masih mada yang belum terealisasi.

Sumber daya yang memadai baik dalam bentuk SDM dan Non SDM merupakan bagian pendukung keberhasilan implementasi suatu program/kegiatan. Memadai disini artinya dari segi kualitas maupun segi kuantitasnya yaitu ketersediaan dari sumber daya manusia sebagai pelaksana program PMB-RW ini juga harus memadai.

Berdasarkan wawancara Kepada Ketua LKM yaitu Bapak Benny Suendrawati, Beliau mengatakan bahwa :

“Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan PMB-RW ini mayoritas Sarjana, dan bahkan ada yang sudah S2. Di kelurahan Sidomulyo Timur sendiri ada 2 tim fasilitator sebagai tenaga pendamping).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa Sumber Daya Manusia sebagai Implementor di program PMB-RW yang ada di Klurahan Sidomulyo Timur ini cukup berpendidikan dan berpengalaman. Akan tetapi untuk meningkatkan pengetahuannya budaya perlu dilakukan penyuluhan dan pelatihan lagi agar kualitasnya mencukupi . Jika dilihat dari struktur organisasi, lembaga pelaksana PMB-RW yang ada di Kota Pekanbaru bisa dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan program. Namun yang dirasakan kurang seperti yang diungkapkan dalam wawancara diatas adalah jumlah personel, terutama fasilitator pendamping Rukun warga.Beban Pendamping yang hanya 1 orang di kelurahan Sidomulyo Timur dengan jumlah RW 25.

5. Pengembangan Lingkungan

Masalah lingkungan dan masalah habitat timbul kebanyakan dari aktifitas manusia sebagai pengguna atau pengelola lingkungan. Masalah lingkungan tersebut memerlukan pendekatan, strategi dan taktik untuk mencari solusinya, dimana solusi yang ingin dicari adalah didasarkan pada satu inti pokok yaitu bagaimana mempertahankan lingkungan agar dapat dimanfaatkan didayagunakan untuk kelangsungan saat ini dan seterusnya.

Strategi-strategi dalam pengembangan lingkungan itu harus dipikirkan dan direncanakan sematang mungkin karena jangan sampai strategi yang direncanakan merusak kelestarian dan eksistensi dari lingkungan itu sendiri. Dimana harus dipahami bahwa strategi pengembangan lingkungan itu mengandung pengertian bahwa mendayagunakan dan mengelola sebaik-baiknya agar lingkungan secara kualitas dapat menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Landasan dari strategi pengembangan lingkungan ini adalah pasal 33 UUD 1945 ayat 3 yang berbunyi “ bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat “.

Jadi dapat dipahami bahwa sumber daya alam di negara kita dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat tapi disatu sisi pemamfaatan itu juga harus memikirkan kebutuhan generasi yang akan datang yang tentunya bagi kemakmuran hidupnya juga. Agar kemakmuran hidup dapat dicapai maka tentunya juga perlu tindakan yang terencana agar pemamfaatan itu tidak merusak lingkungan.

Dari sini perlunya suatu tindakan untuk berusaha semampunya dalam pengembangan lingkungan. Dimana dalam pengembangan lingkungan itu harus memiliki tujuan pasti.

Tujuan pengembangan lingkungan mencakup 4 sasaran yaitu :

1. Membina hubungan keselarasan antara manusia dengan lingkungan ini adalah bagian dari tujuan pembangunan untuk membina manusia seutuhnya yang memiliki ciri-ciri keselarasan, Antara manusia dan masyarakat, Antara manusia dan lingkungan, Antara manusia dengan tuhan penciptanya.
2. Melestarikan sumber-sumber alam agar bisa dimanfaatkan terus-menerus oleh generasi demi generasi. Usaha membangun masyarakat adil dan makmur perlu waktu panjang karena pelestarian sumber-sumber alam sangat penting.
3. Mencegah kemerosotan mutu dan meningkatkan mutu lingkungan sehingga menaikkan kualitas mutu hidup Indonesia
4. Membimbing manusia dari proses perusak lingkungan menjadi pembina lingkungan sering-sering karena manusia kurang informasi dan kurang pengetahuan, manusia merusak lingkungan karena manusia menjadi sasaran pembangunan perlu diusahakan agar sekaligus manusia menjadi pembina lingkungan

Berdasarkan wawancara penulis dengan Lurah Sidomulyo Timur yaitu Bapak Edwar Brata Putra, beliau mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan kegiatan PMB-RW tahun 2016 minim diacc, artinya belum terealisasi usulan kegiatan LKMnya, itu dikarenakan adanya batasan anggaran APBD 2016”.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Unsur Walikota Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Program PMB-RW dari tahun 2014 dan dalam 5 tahun masih tahap inisiasi, memang sudah ada usulan kegiatan yang didanai yaitu dari aspek sosial sebagian dan lingkungan, pernah tahun 2016 pelaksanaan kegiatannya banyak yang belum terealisasi dikarenakan keterbatasan anggaran APBD 2016, ya tentunya mempengaruhi pelaksanaan kegiatan”.

Dari wawancara tersebut terlihat bahwa dalam Peningkatan Pemberdayaan program terkait kedudukan pengembangan Politik masih kurang maksimal dilaksanakan. Hal ini walaupun telah diuraikan tupoksi dengan sangat detail tetapi masih terkendala dalam pelaksanaan karena keputusan ditingkat kota dengan terbatasnya anggaran menyebabkan kegiatan tidak terealisasi seluruhnya.

Indikator pengembangan politik yang dapat diharapkan telah jelas bahwa setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Penulis menanyakan kepada Ketua LKM yaitu Bapak Benny Suendrawati yaitu sebagai berikut :

“Program PMB-RW ini adalah program pemberdayaan yang bentuknya partisipasi masyarakat, jadi kebijakan pemberdayaan selama ini tingkatnya kelurahan, maka pada program PMB-RW ini kita berharap masyarakat di tingkat

Rukun warga dapat juga mengakses pembangunan maupun mengusulkan kebutuhan yang ada dilingkungannya, harapannya ya masyarakat bisa mandiri.”

Program PMB-RW merupakan Pengganti program PNPM yang telah dicanangkan pemerintah di tahun 2014. Program ini merupakan program unggulan dari walikota Perkanbaru, Firdaus, ST., MT.

Namun dalam pelaksanaannya berdasarkan wawancara dan observasi penulis Bersama Lurah Sidomulyo Timur, beliau mengatakan bahwa :

“Masih minimnya partisipasi masyarakat dan ditandai dengan adanya RW yang menolak untuk didanai. Pemahaman Program PMB-RW tidak merata keseluruh elemen masyarakat. Pada tahun 2014 sampai 2016 pola komunikasi antara pendamping, Tim Koordinasi kecamatan dan LKM Kelurahan masih belum berjalan dengan baik.”

Untuk penelitian berikutnya penulis melihat dari segi lingkungan kebijakan program PMB-RW menurut Grindle yang terdiri dari indikatornya sebagai berikut : 1) Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat Strategi, sumber, dan posisi kekuasaan dari implementor akan menentukan keberhasilan implementasi suatu program. Kekuasaan dan kepentingan yang dimiliki dari Implementor atau aktor yang terlibat dalam implementasi program diharapkan dapat mewujudkan kehendak atau keinginan masyarakat sesuai dengan tujuan dari program itu sendiri.

Dengan strategi yang tepat maka sasaran dari kebijakan akan dapat menikmati output dari kebijakan tersebut. Kekuasaan/kewenangan dan strategi

pada program PMB-RW, adalah Tim Koordinasi Kota, Tim koordinasi Kecamatan, tim fasilitator, dan Lembaga keswadayaan Masyarakat Rukun warga (LKM-RW).

Sedangkan strategi yang digunakan dalam mengimplementasikan program kegiatan PMB-RW adalah tahap sosialisasi dengan mengajak dan memotivasi kepada LKM RW agar ikut serta dalam program. Namun strategi dalam menentukan sasaran sebagai pemanfaatnya dirasakan masih Minim. Ini tentu tidak sesuai dengan tujuan dari program yaitu kerukunan, kesejahteraan, dan bersih, sehat, dan asri.

Terkait hal ini dikarenakan strategi yang digunakan oleh tim pelaksana karena berdasarkan padaprinsip Tridaya. Sehingga perkembangan kelompok berkisar pada kegiatan non fisik saja tetapi diharapkan berlanjut ke kegiatan fisik dan masyarakat bisa mandiri. Karakteristik Lembaga dan rezim yang berkuasa Lingkungan dimana kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa yang mementingkan kepentingan rakyat tentu kesejahteraan warga akan tercapai. Namun akan terjadi sebaliknya jika rezim yang berkuasa lebih mementingkan kepentingan pribadi atau perorangan.

Rakyat akan menjadi dipojokkan dan bukan menjadi prioritas , sehingga masyarakatlah yang akan menjadi korban dari rezim kepemimpinan yang berkuasa. Peran dari lembaga yang mengimplementasikan program PMB-RW ini sangat mendukung terlaksananya program untuk kepentingan masyarakat. Namun

di Kelurahan Sidomulyo Timur ini belum secara maksimal dilakukan terutama pada sasaran dari kebijakan. Kurangnya memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan.

Kepatuhan Dan Daya Tanggap Kelompok Sasaran Kelompok sasaran yaitu LKM-RW harus berperan aktif, karena hal ini akan sangat mempengaruhi keberhasilan program dari pemerintah. Seyogyanya Program pemberdayaan ini adalah demi kepentingan rakyat, sehingga rakyat disini hendaknya dapat sejalan dengan pemerintah. Ini dilakukan agar apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam implementasinya dapat segera diketahui dan kemudian dapat dikoreksi dan dibenahi, serta program dapat berjalan sebagaimana mestinya.

6. Pengembangan Personal/Spiritual

Pengembangan Personal, Melibatkan aspek Perkembangan Personal (personal growth) dan Pengembangan Personal (personal development). Masyarakat merupakan konteks yang lebih baik untuk pengembangan personal dari pada struktur birokrasi yang lebih impersonal dari pemerintah yang besar dan bisnis yang besar. Pengembangan Personal yaitu berupaya menemukan cara memenuhi kebutuhan individual masyarakat melalui jaringan, struktur dan interaksi masyarakat, bukan melalui jasa yang dibuat oleh profesionalis yang dikemas.

Pengembangan Spiritual yaitu Semua orang memiliki sifat dasar spiritual, yakni perasaan spiritual yang menyatukan orang-orang, binatang, tanah dan segala sesuatu ke dalam satu kesatuan dan membatasi hubungan seseorang dengan

lingkungan alam dan nilai spiritual merupakan bagian penting dari pembentukan kembali masyarakat manusia dan memberikan makna dan tujuan kehidupan manusia serta pengembangan masyarakat sebagai upaya memperkuat dan menghormati tradisi agama dan spiritual masyarakat.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Unsur Walikota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk tahap inisiasi selama lima tahun ini masih banyak kendala dalam realisasi namun sudah ada beberapa pembekalan pelatihan yang dilaksanakan. Untuk tim koordinator tetap melaksanakan sosialisasi. Berdasarkan review pelaksanaan program PMB-RW tahun 2014-2016 untuk pelaksanaan kegiatan penataan kawasan lingkungan dari 166 RW prioritas hanya dialokasikan anggaran”.

Kemudian penulis mewawancarai Lurah Sidomulyo Timur yaitu Bapak Edwar Brata Putra, beliau mengatakan bahwa:

“Tahap sosialisasi Program PMB RW dilaksanakan tingkat kota, sampai RW dan juga karena program unggulan oleh bapak Walikota Pekanbaru, pak Firdaus. Jadi beliau juga sering menyampaikan dalam kegiatannya menjelaskan program PMB-RW ini dengan melakukan perkenalan terhadap program ini melalui musyawarah.”

Dari segi pelaksana program untuk tahap sosialisasi telah dilaksanakan, namun jika dilihat dari data penerima usulan kegiatan Program masih sedikit dan lebih kepada kegiatan non fisik terutama di wilayah Kelurahan Sidomulyo

Timur. Hal ini berkaitan dengan informasi dari fasilitator kelurahan masih ada RW yang menolak untuk kegiatan lingkungan Program PMB-RW. Masyarakat kelurahan Sidomulyo Timur sebagai sasaran dari program PMB-RW ini juga merupakan bagian dari pelaksana. Dimana yang melaksanakannya melalui LKM RW masing – masing. Ketepatan sasaran untuk pemanfaat program PMB-RW, apakah program telah diberikan kepada mereka yang layak menerimanya yaitu seluruh RW di lingkungan Sidomulyo Timur.

Seperti wawancara penulis dengan Sekretaris Lurah yaitu Ibu Yuliarti, beliau mengatakan bahwa:

“Penentuan kelompok mana yang bisa alokasi anggaran adalah LKM-Rw yang mengusulkan kegiatan dan telah diverifikasi di kecamatan terhadap kelengkapan berkas. Kemudian Pengguna Anggaran menetapkan LKM-RW yang lulus verifikasi dan akan membentuk Tim pekerja swakelola yang ditetapkan oleh ketua LKM-RW. Ini dilakukan agar jelas siapa penggunanya dan sesuai seperti pada Petunjuk teknisnya.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran yang diberikan adalah benar kepada LKM yang mengusulkan kegiatan. Namun dilapangan penulis melihat bahwa penerimanya adalah masih kepada RW Prioritas. Sedangkan RW lain masih mada yang belum terealisasi.

Sumber daya yang memadai baik dalam bentuk SDM dan Non SDM merupakan bagian pendukung keberhasilan implementasi suatu program/kegiatan. Memadai disini artinya dari segi kualitas maupun segi kuantitasnya yaitu ketersediaan dari sumber daya manusia sebagai pelaksana program PMB-RW ini juga harus memadai.

Berdasarkan wawancara Kepada Ketua LKM yaitu Bapak Benny Suendrawati, Beliau mengatakan bahwa :

“Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan PMB-RW ini mayoritas Sarjana, dan bahkan ada yang sudah S2. Di kelurahan Sidomulyo Timur sendiri ada 2 tim fasilitator sebagai tenaga pendamping).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa Sumber Daya Manusia sebagai Implementor di program PMB-RW yang ada di Klurahan Sidomulyo Timur ini cukup berpendidikan dan berpengalaman. Akan tetapi untuk meningkatkan pengetahuannya budaya perlu dilakukan penyuluhan dan pelatihan lagi agar kualitasnya mencukupi . Jika dilihat dari struktur organisasi, lembaga pelaksana PMB-RW yang ada di Kota Pekanbaru bisa dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan program. Namun yang dirasakan kurang seperti yang diungkapkan dalam wawancara diatas adalah jumlah personel, terutama fasilitator pendamping Rukun warga.Beban Pendamping yang hanya 1 orang di kelurahan Sidomulyo Timur dengan jumlah RW 25.

C. Hambatan-hambatan Mengenai Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Di Kelurahan Sidomulyo Timur

1. Sangat minimnya dana yang di realisasikan Pemerintah Kota sehingga Pelaksanaan Program berjalan tidak merata. Dalam Pelaksanaan Program PMB-RW memerlukan dana untuk Pelaksanaan kegiatan agar kegiatan berjalan dengan baik.

2. Tenaga Tenaga pendamping sangat mempengaruhi keberhasilan Pelaksanaan Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Timur. Tenaga Pendamping yang dipilih dari kalangan sarjana akan membuat Pelaksanaan Program yang dilakukan menjadi program yang berkualitas yang akan meningkatkan sub-indikator pada indikator pertama yaitu ekonomi, sosial, dan intelektual. Sesuaikan dengan sarjana keahlian mereka masing-masing.
3. Pikiran/Ide Ide atau gagasan adalah rancangan yang tersusun dipikiran. Pada faktor Ini yang membawa dampak berpengaruh terhadap bagaimana partisipasi dalam bentuk ide atau pikiran dari masyarakat, tenaga

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis pada “Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Di Kelurahan Sidomulyo Timur” pada dasarnya adalah suatu kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui Pemberdayaan yaitu Kepelatihan. Adanya Pelaksanaan PMB- RW tersebut untuk mendasari bahwasanya Rukun Warga merupakan suatu pembagian wilayah Indonesia dibawah kelurahan, Rukun Warga adalah lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Kedekatan tersebut untuk mencakup atau mengetahui warganya yang membutuhkan ataupun dengan Pelaksanaan PMB-RW bisa meningkatkan taraf kehidupan.

Dari penelitian yang telah penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Di Kelurahan Sidomulyo Timur belum bisa meningkatkan ekonomi, sosial masyarakat, akan tetapi pengetahuan masyarakat yang mengikuti pelatihan sudah didapatkan dalam Pelaksanaan Program PMB-RW. Akan tampilan/kemampuan tersebut tidak bisa dijadikan pekerjaan karena tidak adanya modal untuk peralatan dan lain sebagainya dalam membuat lapangan pekerjaan. Partisipasi dari tenaga pendamping sudah berjalan dan memiliki manfaat bagi berjalannya Pelaksanaan Program PMB-RW dalam perencanaan dan pengawasan.

2. Adapun Faktor yang mempengaruhi Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Di Kelurahan Sidomulyo Timur yaitu Partisipasi berbentuk dana dan tenaga/ide berupa gagasan serta keadilan. Dana untuk pelaksanaan kegiatan yang akan mempengaruhi Pelaksanaan sehingga partisipasi tenaga pendamping dan ide gagasan berjalan sesuai keinginan masyarakat. Sehingga berlangsungnya keadilan dalam Pelaksanaan Program PMB-RW.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, penulis memberikan saran atau Masukan-masukan sebagai berikut :

1. Agar tercapai keberhasilan dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB- RW) pada peningkatan ekonomi dan status sosial sebaiknya Pelaksanaan berupa pelatihan lebih dimaksimalkan dalam pertemuan pembelajaran. Pertemuan lebih di perbanyak. Diberikan modal untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri melalui keterampilan dan intelektual yang didapat sewaktu pelatihan. Melalui anggaran dari pemerintah daerah Kota Pekanbaru untuk menyiapkan dana agar diberikan modal berupa barang menurut kemampuan/keterampilan peserta.
2. Melihat dari pelaksanaan PMB- RW ini pada kelurahan Sidomulyo Timur pada pelatihan PMB- RW ini tidak merata masyarakat mendapatkan program ini,sebaiknya untuk pelaksanaan PMB-RW ini harus sama rata semua RW

mendapatkan program pelatihan PMB-RW ini, agar ketika pelaksanaan program PMB-RW lebih efektif dan dapat mencapai tujuan yang telah dibuat



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alwisol, 2009, *Psikologi Kepribadian*, Malang, UMM Press
- Ayok Fatnuriawan, 2014, *Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik di Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Tahun 2014*, *Online Journal System (OJS)*, Universitas Negeri Malang, (10 halaman), Diakses Selasa, 7 Mei 2019, jam 14.35, <http://jurnal-online.um.ac.id>
- Abdurahmat, 2013, *Efektivitas Kinerja Organisasi*, On Line, Diakses Selasa, 7 Mei 2019, jam 14.35, <http://www.wordpress.com/abdurahmat.html>
- Dessler, Gary, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Alih Bahasa, Jakarta, PT. Indeks
- Dwiyanto, Agus dkk, 2006, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Jogjakarta, Gajah Mada University Press
- Dorland WAN (2010). Kamus kedokteran Dorland. Edisi ke-31. Jakarta: EGC
- Foster, Bill, 2012, *Pembinaan Untuk Peningkatan Kinerja Karyawan*, Jakarta, PPM
- Gibson et al, 2012, *Organisasi dan Manajemen*, Jakarta, Erlangga
- Gitosudarmo, Indriyo dan Sudita I. Nyoman, 2011, *Perilaku Organisasi*, Yogyakarta, BPFE
- Heri Junaidi, 2014, *Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau*, *eJournal Administrasi Negara*, Vol.4 No.2, 2014 : 1353-1364, ISSN 0000-0000
- Jaitun, 2013, *Kinerja Apartatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung*, *eJournal Pemerintahan Integratif*, Vol. 1 No.1, 2013 : 13 – 27, ISSN 0000-0000, Universitas Mulawarman
- Kencana, Inny Syafiie, 2009, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta, PT. Adi Maha Satya
- Kusdi, 2009, *Teori Organisasi dan Administrasi*, Jakarta, Salemba Humanika
- Kumorotomo, Wahyudi, 2013, *Sistem Informasi Manajemen*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Kotler, Philip, 2011, *Marketing Management, Analisis Perencanaan, Implementasi dan Kontrol*, Edisi Ke 12, Penerbit Salemba Empat
- Lubis, Hari S.B dan Huseini Martani, 2014, *Pengantar Teori Organisasi Suatu Pendekatan Makro*, *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Jakarta,

Universitas Indonesia

- Muchsen, Mursad, 2009, *Analisis Tingkat Kepuasan Nasabah Terhadap Mutu Pelayanan Bank BRI Cabang Pinrang Sulawesi Selatan*, Skripsi, Program Sarjana Ekstensi Manajemen Agribisnis, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor
- Mahsun, Muhammad, 2010, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta, FE UGM
- Makmur, Syarif, 2013, *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Mulyasa, 2011, *Peningkatkan Kinerja Pegawai*, Bandung, Rosda Karya
- Martoyo, Susilo, 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, BPFE
- Mangkuprawira, Sjafriz, 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Ndraha, Taliziduhu, 2013, *Budaya Organisasi*, Jakarta, PT. Rieneka Cipta
- Nawawi, Hadari, 2013, *Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri*, Yogyakarta, Gajah Manda University Press
- Notoatmodjo S., 2012, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta, Rieneka Cipta
- Prayitno, 2009, *Dasar Teori dan Praktisi Pendidikan*, Jakarta, Grasindo
- Putri, Amanda Dwi dan Sahuri Chalid, 2014, *Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dalam Penerimaan Pelayanan Administratif di Kantor Camat Tampan Kota Pekanbaru*, (10 halaman), diakses Senin, 6 Mei 2019, jam 09.45, <https://www.academia.edu>
- Riduwan, 2005, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung, Alfabeta
- Rusyan, A. Tabrani dan Sutisna M., 2011, *Kesejahteraan dan Motivasi Dalam Meningkatkan Kinerja*, Tangerang, PT. Nusantara Lestari Cariapratama
- Roro Rukmini Widiaswari, 2012, *Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Banjar Baru*, Jurnal Spread, Vol.2 No.2, Oktober 2012, Universitas Achmad Yani (UVAYA), Banjarmasin
- Ratminto, 2015, *Menejemen Pelayanan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Sugiyono, 2012, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung, Alfabeta

Sobirin, Achmad, 2010, *Budaya Organisasi*, Yogyakarta STIM YKPK

Siagian, P. Sondang, 2013, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta, Gunung Agung

Sutarto, 2013, *Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press

Sedarmayanti, 2013, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung, CV. Mandar Maju

Simamora, Henry, 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, YKPI

Sulistiyani, Teguh Ambar dan Rosidah, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta

Dokumen :

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009

PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil

Departemen Pendidikan Nasional, 2011, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa

Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, *Kualitas Pelayanan Publik*, Jakarta
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

Kepmen PAN Nomor 81 Tahun 1993 Tentang Kualitas Pelayanan Publik

Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

جامعة الإسلام الريو

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fakpol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 26/ /A-UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Irsyaddinnas Harpan Saputra
 NPM : 147310640
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Judul Skripsi : Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program
 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota
 Pekanbaru (Studi Di Kelurahan Sidomulyo Timur)
 Persentase Plagiasi : 22%
 Jumlah Halaman : 105 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
 Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 13 Juli 2021

Hormat Kami,
 Wakil Dekan Bid. Akademik



Indra Saffi / S.Sos., M.Si
 NIK. 970702230

